VALIDASI AHLI DAN UJI COBA EMPIRIS HASIL PENGEMBANGAN DISAIN MANAGEMEN RESOLUSI KONFLIK PROGRAM SINERGI REVITALISASI ANTARA PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KORIDOR KALIMANTAN TIMUR

OLEH:

Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd (Ketua)
Prof. Dr. Susilo, M.Pd (Anggota)
Dr. Vandalita Rambitan, M.Si (Anggota)

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan	:	Resolusi Konflik Melalui Disain Managemen Program Sinergi Revitalisasi Antara Pemerintah (Disperindakop – Disbun, Distamben) Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Koridor Pemberdayaan Ekonomi Di Kalimantan Timur
Peneliti / Pelaksana		
Nama Lengkap	:	Prof.Dr ALOYSIUS HARDOKO M.Pd
NIDN	:	0029085706
Jabatan Fungsional	:	
Program Studi	:	Administrasi Pendidikan
Nomor HP	:	081334120456
Surel (e-mail)	:	aloysiushardoko@yahoo.co.id
Institusi Mitra (jika ada)		
Nama Institusi Mitra	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Tahun Pelaksanaan	:	Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan	:	Rp. 150.000.000,00
Biaya Keseluruhan	:	Rp. 600.000.000,00

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Makrina Tindangan, M.Pd)
NIP/NIK 196309031987102001

Samarinda, 30 - 12 - 2013,
Ketua Peneliti

(Prof.Dr ALOYSIUS HARDOKO M.Pd)
NIP/NIK

Menyetujui,
Rektor

(Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU)
NIP/NIK 195304101983011001

IDENTITAS KEGIATAN :

1. Topik Usulan : Validasi Ahli dan Uji Coba Empiris Draft Hasil Pengembangan Disain Managemen Resolusi Konflik Program Sinergi Revitalisasi antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Terkait Pemberdayaan Ekonomi Koridor Kalimantan Timur

   Tema : Pusat Produksi, Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energy Nasiobal (Batu bara, Migas, Kelapa Sawit, Perkayuan, Bauksit dan Besi Baja)

2. Ketua Peneliti :
   a. Nama Lengkap : Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd
   b. Bidang Keahlian : Teknologi Pendidikan/ Pendidikan
3. Anggota Peneliti :
   a. Nama : Prof. Dr. Susilo, M.Pd
   b. Keahlian : Pendidikan
   c. Curahan Waktu : 12 jam/minggu

   a. Nama : Dr. Vandalita Rambitan, M.Si
   b. Keahlian : Pendidikan
   c. Curahan Waktu : 12 jam/minggu
4. Isu Strategis : Resolusi konflik kasus tambang dan kelapa sawit di Kaltim
5. Topik Kegiatan : Validasi dan Uji Coba Empiris Draft Hasil Pengembangan Disain Managemen Resolusi Konflik Program Sinergi Revitalisasi antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Terkait Pemberdayaan Ekonomi Koridor Kalimantan Timur
6. Obyek Kegiatan : Validasi Ahli dan Uji Coba Empiris Draft Disain Resolusi Konflik di Lapangan
7. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kubar, Kukar dan Pasir di Kalimantan Timur
8. Hasil target : Model Disain Resolusi Konflik Baku yang dijadikan dasar Kebijakan oleh pihak terkait dalam pemberdayaan ekonomi Di Kalimantan Timur
9. Keterangan lain : ----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Validasi ahli tahap 1 silabus desain manajemen pengetahuan sikap 42

Tabel 2.validasi ahli tahap 2 silabus desain manajemen pengetahuan sikap 42

Tabel 3. Validasi Ahli Tahap I Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Andragogi Holistik (RPPAH)..... 43

Tabel 4. Validasi Ahli Tahap 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Andragogi Holistik (RPPAH)..... 43

Tabel 5. Validasi Ahli Tahap 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Andragogi Holistik (RPPAH)..... 44

Tabel 6. Validasi Ahli Tahap 1 Lembar Kerja Andragogi Holistik (LKAH) 44

Tabel 7. Validasi Ahli Tahap 2 Lembar Kerja Andragogi Holistik (LKAH) 44

Tabel 8. Validasi Ahli Tahap 3 Lembar Kerja Andragogi Holistik (LKAH) 45

Tabel 9 . Validasi Ahli Tahap 1 Bahan Ajar Andragogi Holistik (BAAH) 45

Tabel 10 . Validasi Ahli Tahap 2 Bahan Ajar Andragogi Holistik (BAAH) 45

Tabel 11 . Validasi Ahli Tahap 3 Bahan Ajar Andragogi Holistik (BAAH) 45

Tabel 12. Validasi Ahli Tahap 1 Media Pembelajaran Andragogi Holistik (MPAH) 46

Tabel.13 Validasi Ahli Tahap 2 Media Pembelajaran Andragogi Holistik (MPAH) 46

Tabel.14 Validasi Ahli Tahap 3 Media Pembelajaran Andragogi Holistik (MPAH) 46

Tabel.15 Validasi Ahli Tahap 1 Lembar Observasi Proses Pembelajaran Andragogi Holistik (LOPPAH)..... 47

Tabel.16Validasi Ahli Tahap 1 Lembar Observasi Proses Pembelajaran Andragogi Holistik (LOPPAH)..... 47

Tabel.17 Validasi Ahli Tahap 3 Lembar Observasi Proses Pembelajaran Andragogi Holistik (LOPPAH)..... 47

Tabel.18 Validasi Ahli Tahap 1 Evaluasi Produk Serta Kinerja Pembelajaran Holistik (EPAH)..... 47

PRAKATA

Syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga laporan tahunan penelitian unggulan yang berjudul keterkaitan pengembangan managemen pengetahuan dan sikap berbasis pendekatan andragogi sebagai solusi masalah lingkungan akibat perilaku kegiatan ekonomi tambang batu bara di kalimantan timur dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal penelitian ini.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada lembaga penelitian yang telah memfasilitasi dalam penyelesaian laporan tahunan, pengiriman proposal, pengumuman seleksi hasil proposal dan kegiatan lain yang terkait dengan kelancaran penyelesaian proses dan laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional yang telah menyediakan dana untuk terlaksananya penelitian ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada guru-guru serta kepala sekolah yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian ini. Tim peneliti menyadari bahwa dalam penulisan laporan tahunan ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan laporan penelitian ini. Akhirnya kami mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

ABSTRAK

Kegiatan penelitian ini adalah penelitian validasi dan uji coba lapangan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan disain resolusi konflik program sinergi revitalisasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebagai bentuk pemecahan masalah melalui disain resolusi konflik akibat konflik yang sering terjadi di area tambang dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

Di samping itu, fokus masalah pada penelitisn ini terkait dengan program bantuan yang sering dilakukan oleh CSR bersifat sementara dan lebih berorientasi pada "charity" (sumbangan) dan bersifat sepihak yang dirancang oleh perusahaan itu sendiri. Program CSR belum disinergikan dengan program yang semestinya dijalankan selaras dengan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang dan kelapa sawit.

Dalam penelitian tahap I telah ditemukan kasus-kasus konflik, sumber permasalahan dan upaya resolusi konflik serta draft disain resolusi konflik yang didisain berdasarkan rujukan teori dari Burke & Simon Fisher, 2003. Referensi draft ini dipilih dengan dasar disain ini sangat memperhitungkan sisi kemanusiaan dan sederhana serta praktis dalam aplikasinya.

Berdasarkan hasil penelitian tahap I, selanjutnya pada penelitian tahap 2 ini dilakukan validasi ahli ke Jogyakarta, yaitu ke Universitas Gadjah Mada. Dengan pakar sosiologi Dr. Muhammad Najib, MA.. Hal ini perlu dilakukan sebab rancangan draft ini perlu dilakukan revisi berdasarkan pendapat ahli. Hasil validasi ahli terdapat beberapa revisi, yaitu:1) Judul diluruskan, 2) rumusan masalah dipertegas, 3) pedoman wawancara dibakukan, 4) FGD harus menghadirkan orang yang berkompeten (decision maker) di bidangnya. Sesudah itu dipandang penting untuk dilakukan uji coba lapangan kepada responden untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan disain, yang diambil secara purposive mengacu pada criteria pada tahap I.

Dari hasil validasi ahli dan uji coba lapangan dengan FGD di daerah Kukar dan Kubar, diperoleh masukan/saran/kritik dan memperoleh draft disain managemen resolusi konflik yang baku setelah melalui revisi dalam program sinergi revitalisasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi koridor Kalimantan Timur yang pada tahap selanjutnya (tahap III) akan dilakukan eksperimen pada subyek daerah yang memiliki isu konflik, sehingga menghasilkan resolusi yang tepat.

Kata Kunci : Validasi Ahli, Uji Coba Empiris, FGD. Disain Resolusi Konflik yang baku

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Koridor ekonomi masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) terdiri dari 6 koridor. Kalimantan masuk dalam koridor 3. Kegiatan ekonomi (KE) MP3EI koridor 3 Kalimantan adalah batu bara, kelapa sawit, hutan, migas, tebaga dan bauksit. Ternyata program pemerintah tersebut akan dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Saat ini di Kalimantan Timur khusus untuk kegiatan tambang batu bara, sawit telah menimbulkan permasalahan yang dampak langsungnya dirasakan oleh masyarakat akibat kegiatan pertambangan dan kelapa sawit berkembang pesat di daerah ini.

Seiring dengan menjamurnya perusahaan, baik yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya tambang batubara maupun perkebunan dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kalimantan Timur, maka sebagai dampaknya akhir-akhir ini banyak terjadi kasus konflik sosial secara terbuka, khususnya yang melibatkan pihak-pihak perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara seperti terjadinya penyanderaan asset perusahaan, pembakaran fasilitas-fasilitas perusahaan, pengambilalihan areal petambangan atau perkebunan, pemblokiran akses jalan, pembekuan kegiatan perusahaan, tuntutan ganti rugi yang berlebihan sehingga perusahaan merasa keberatan, dan berbagai kasus konflik yang merembet ke seluruh daerah.

Tragedi Mesuji yang mencuat pada pertengahan Nopember 2011 yang lalu hanyalah bagian kecil dari bara konflik social dalam sengketa lahan di Indonesia. Pada dasarnya, berbagai dimensi konflik, baik menyangkut konflik lahan perkebunan, lahan tambang gagal dikelola untuk dipecahkan tanpa kekerasan oleh pihak pemerintah.

Motif dari terjadinya kasus konflik dengan masyarakat acapkali hampir sama yaitu karena adanya isu perampasan lahan warga oleh perusahaan. Konflik menyangkut lahan memiliki dimensi seperti konflik lahan komunitas adat melawan perusahaan Negara dan swasta, konflik lahan komunitas petani gurem melawan perusahaan. Konflik lahan sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak jaman colonial, seperti Onderdeming) sampai berubah menjadi hak Erfphact. Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik, baik vertical maupun horizontal yang perlu diselesaikan dengan disain managemen yang benar.

Beberapa kasus yang terjadi mulai dari kasus di Nunukan, Tarakan, Panajam Paser Utara dan yang terakhir di Kutai Barat dan terakhir bencana longsor akibat tambang batubara milik P.T. Amelia di Sanga-Sanga yang menewaskan 3 orang, menunjukkan bahwa potensi konflik di daerah ini akibat maraknya perkebunan dan pertambangan masih sangat terbuka. Konflik yang terjadi di Muara Tae di daerah Kutai Barat (Kubar) adalah konflik perebutan lahan di mana masyarakat terdesak dan terancam oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, yang melibatkan dua kelompok warga dayak Benuaq dengan P.T. Munte Waniq Jaya Perkasa.

Pada hal semua itu bisa diakibatkan adanya kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya resolusi konflik menjadi penting untuk meredam suasana saat konflik terjadi maupun potensi konflik yang sewaktu-waktu timbul.

Bertolak dari beberapa kasus sengketa lahan di Kalimantan Timur, maka daerah yang mengalami banyak konflik untuk perkebunan kelapa sawit adalah di Kabupaten Pasir, sedangkan untuk kasus dalam tambang batubara ada di Kutai Kartanegara. Sementara di daerah Kubar dan Kutim memiliki karakteristik yang sama, namun kasus yang terjadi sebagai konflik tidak sebanyak yang terjadi di Kabupaten Pasir dan di Kutai Kartanegara.

Khususnya di Kalimantan Timur, operasional wilayah perkebunan, pertambangan menempati urutan terbesar mencapai kisaran 60%, baik berskala nasional maupun internasional. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan khusus bagi pemerintah dan pihak perusahaan sendiri.

Lebih-lebih dapat mengancam stabilitas pemerintah dan keberlangsungan perusahaan, karena masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi perkebunan/pertambangan merasakan bahwa modal social dalam diri mereka ternyata hingga saat ini kurang diakomodir dan direspon, baik oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.

Masyarakat belum merasakan manfaat pemenuhan kesejahteraan jangka pendek apalagi jangka panjangnya. Apalagi masyarakat merasa bahwa bahan baku berada di areal atau lokasi di mana mereka tinggal. Hal ini memicu adanya kecenderungan terjadinya konflik dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerawanan social yang mengganggu kestabilan semua pihak, baik di pihak pemerintah sendiri maupun pada pihak perusahaan serta dalam diri masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, adanya pemberdayaan pada masyarakat dari berbagai aspek untuk peningkatan kesejahteraan dirasakan amat mendesak untuk segera diatasi dan menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak , serta pentingnya mencari resolusi konflik sebagai upaya pemecahan masalah, baik berasal dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian hal yang paling menarik dalam upaya mencari resolusi konflik dalam berbagai kasus yang muncul adalah bagaimana memahami konflik untuk sendiri. Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam interaksi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan terjadi pandangan yang berbeda. Pandangan masyarakat terhadap aspek social dan politik berbeda dengan pandangan perusahaan dan pemerintah.

Sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak dapat dihindarkan dan itu dapat memperkaya semua pihak. Berbagai perbedaan yang ada dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu: dimensi "alami" dan dimensi yang terjadi akibat kondisi tertentu, seperti : status, kekuasaan, dan sebagainya.

Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memiliki maksud yang sama atau melihat perbedaan itu sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.

Kondisi konkrit di lapangan menunjukkan bahwa program CSR sudah banyak dilakukan oleh pihak perusahaan, baik oleh perusahaan tambang batubara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang yang ada di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Berbagai program yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan rancangan managemen perusahaan dan disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan dari pihak perusahaan itu sendiri. Program yang dilakukan memang memberi manfaat bagi masyarakat, namun manfaat yang ada bersifat manfaat sementara, dan tidak memberi manfaat yang bersifat pemberdayaan sumber daya masyarakat dalam jangka panjang.

Acapkali program yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap perusahaan seringkali tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Belum lagi program revitalisasi oleh dinas terkait tidak didasarkan pada kondisi nyata permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini yang kemudian memicu konflik antara perusahaan dengan program CSRnya dan keinginan serta harapan masyarakat yang tidak terpenuhi di sisi lainnya.

Kenyataan ini menuntut pemahaman terhadap arti dari konflik itu sendiri, agar tidak terjadi peningkatan dari konflik menuju tindak

kekerasan. Oleh karena itu, konflik yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

Untuk itulah maka penelitian yang akan dimplementasikan pada tahun ke dua ini berjudul:" Validasi ahli dan Uji coba empiris Hasil Pengembangan draf disain manajemen resolusi konflik program revitalisasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait dengan Pemberdayaan ekonomi koridor Kalimantan".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada bagian mana, hasil validasi ahli terhadap draf pengembangan disain resolusi konflik yang perlu mendapatkan perbaikan/ masukan, sehingga dapat dijadikan disain resolusi konflik yang baku untuk memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait koridor ekonomi Kalimantan ?
2. Pada bagian mana dari draf hasil pengembangan disain resolusi konflik yang perlu perbaikan/masukan setelah dilakukan uji coba lapangan melalui forum FGD di daerah, sehingga dapat menjadi disain resolusi konflik yang baku untuk memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi koridor Kalimantan ?
3. Mengapa draft disain manajemen resolusi konflik yang sudah di validasi ahli dan uji coba empiris melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dinyatakan menjadi draft disain yang siap digunakan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi terkait pemberdayaan ekonomi koridor Kalimantan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Membentuk jejaring kerja sama/ kemitraan antara pihak perguruan tinggi dan mitra sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan di bidang kerawanan social yang berkaitan dengan resolusi konflik yang sering terjadi antara pemerintah- perusahaan (CSR) dan masyarakat terkait kegiatan ekonomi koridor MP3EI Kalimantan.
2. Pengembangan disain managemen program sinergi revitalisasi oleh pemerintah, CSR perusahan dan masyarakat sebagai resolusi konflik terkait kegiatan ekonomi koridor MP3EI Kalimantan
3. Menemukan disain managemen resolusi konflik yang dapat digunakan dalam memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait kegiatan ekonomi koridor MP3EI

D. URGENSI PENELITIAN

Urgensi dari penelitian ini adalah merujuk kepada bidang prioritas nasional, yaitu: berkaitan dengan stabilitas keamanan, di mana saat ini bangsa Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai macam konflik yang belakangan ini sering terjadi dan disadari jika tidak dilakukan upaya pemecahan yang mengakar kemungkinan besar akan terjadi konflik dan terus berulang yang pada akhirnya akan mengancam stabilitas pemerintah, stabilitas perusahaan serta stabilitas masyarakat itu sendiri, yang berdampak negatif pada berbagai aspek, khususnya aspek kesejahteraan masyarakat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP KONFLIK

1. Memahami Konflik

Menurut Wijono (1993), jika dilihat dari ciri-ciri konflik, terdapat beberapa ciri, yaitu: :1) Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan 2). Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3) Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang- pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri. 4) Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut, 5) Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya.

Selanjutnya dikemukakan tentang dari mana sumber konflik terjadi, maka sumber-sumber konflik itu berasal dari konflik dalam diri individu (Intra-individual Conflict),yaitu Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai **(goal conflict).** Menurut Wijono (1993), ada tiga jenis konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (goal conflict), yaitu:1) *Approach-approach conflict*, dimana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih,

tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain, 2) *Approach-Avoidance Conflict*, dimana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuandan pada waktu yang sama didorong untuk melakukan terhadap persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut, 3) *Avoidance-Avoidance Conflict*, dimana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Dalam hal ini, approach-approach conflict merupakan jenis konflik yang mempunyai resiko paling kecil dan mudah diatasi,serta akibatnya yang tidak begitu fatal.

Setiap komponen dalam masyarakat senantiasa memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Ketika masyarakat mempelajari suatu masalah secara bersama mereka menganggap bahwa karena setiap orang memiliki fakta yang sama, maka akan sampai pada proses analisis.

Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama atau ketika suatu pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain (Simon Fisher, 2000). Kemungkinan lainnya, perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.

Konsep konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan seringkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Jawed Luddin, 2002). Oleh

karena itu, konflik dirasakan tetap berguna apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan sebuah masyarakat yang hiterogen dalam berbagai sendi kehidupan.

Dari tingkat mikro antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, Negara, semua bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, contohnya: kesenjangan status social , kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah mata rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif.

Konflik meskipun menimbulkan masalah, namun konflik juga memberikan manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain, membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mendorong kea rah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, menambah kepedulian diri, mendorong psikologis.

Konflik juga diperlukan untuk meningkatkan stumulasi berbagai kelompok dan organisasi. Organisasi atau perusahaan akan runtuh karena tidak mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan yang berubah dan juga perubahan hubungan kekuasaan yang terjadi.

2. Menangani Konflik

Penanganan terhadap konflik membutuhkan intensivitas dari konflik itu sendiri. Konflik perlu dimunculkan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang nyata, sehingga isu-isunya lebih banyak diketahui dan tindakan efektif untuk menanganinya dapat dimulai. Hal ini sering mengharuskan untuk berpihak dengan kelompok yang tersisih dan menggunakan berbagai strategi untuk memberdayakan mereka. Ada perbedaan yang perlu

diperhatikan antara “mengintensifkan” dan “meningkatkan” konflik. Mengintensifkan konflik adalah mengubah konflik laten ke permukaan dan menjadikannya terbuka untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan meningkatkan konflik yang merujuk kepada suatu situasi yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketegangan dan kekerasan (Richard Smith, 2003).Menurut Wijono (1993 : 66-112), untuk mengatasi konflik dalam diri individudiperlukan paling tidak tiga strategi yaitu:**1) Strategi Kalah-Kalah (Lose-Lose Strategy)**.Beorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Biasanya individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah (berkompromi) atau membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa orang atau kelompok ketiga sebagai penengah. Dalam strategi kalah-kalah, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu. Maka pihak ketiga diundang untuk campur tangan oleh pihak-pihak yang berselisih atau barangkali bertindak atas kemauannya sendiri.

Ada dua tipe utama dalam campur tangan pihak ketiga yaitu:a. Arbitrasi (Arbitration) Arbitrasi merupakan prosedur di mana pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih, pihak ketiga bertindak sebagai hakim dan penengah dalam menentukan penyelesaian konflik melalui suatu perjanjian yang mengikat.b. Mediasi (Mediation).Mediasi dipergunakan oleh Mediator untuk menyelesaikan konflik tidak seperti yang diselesaikan oleh abriator, karena seorang mediator tidak mempunyai wewenang secara langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai dan rekomendasi yang diberikan tidak mengikat.**2) Strategi Menang-Kalah (Win-Lose Strategy)**. Dalam strategi saya menang anda kalah (win lose strategy), menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan.

Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan win-lose strategy (Wijono, 1993), dapat melalui: a. Penarikan diri, yaitu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas

sebagai akibat dari ketergantungan tugas (task independence), b. Taktik-taktik penghalusan dan damai, yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan untuk menghindari terjadinya konfrontasi terhadap perbedaan dan kekaburan dalam batas-batas bidang kerja (jurisdictioanal ambiquity),c.Bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik, karena adanya rintangan komunikasi (communication barriers).d. Taktik paksaan dan penekanan, yaitu menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan (power) melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu (individual traits).e Taktik-taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber (competition for resources) secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, **3) Strategi Menang-Menang (Win-Win Strategy)**.

Penyelesaian yang dipandang manusiawi, karena menggunakan segala pengetahuan, sikap dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik. Jadi strategi ini menolong memecahkan masalah pihak-pihak yang terlibat dalamkonflik, bukan hanya sekedar memojokkan orang. Strategi menang-menang jarang dipergunakan dalam organisasi dan industri, tetapi ada 2 cara didalam strategi ini yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan konflik interpersonal yaitu: a. Pemecahan masalah terpadu (Integrative Problema Solving) Usaha untuk menyelesaikan secara mufakat atau memadukan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak, b. Konsultasi proses antar pihak (Inter-Party Process Consultation) Dalam penyelesaian melalui konsultasi proses, biasanya ditangani oleh konsultan proses, dimana keduanya tidak mempunyai

kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan kekuasaan atau menghakimi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Beberapa aspek mendasar mengenai konflik dapat dibedakan ke dalam dua sumbu, yaitu: sasaran dan perilaku. Hal ini selaras dengan konsep konflik yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran yang tidak sejalan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Keempat kotak dalam gambar berikut ini menunjukkan hubungan antara berbagai sasaran dan perilaku serta implikasinya dalam konteks konflik. Tujuannya adalah untuk menggambarkan tipe-tipe konflik yang menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan intervensi.

Dalam scenario ini tidak ada situasi yang ideal, tetapi keempat tipe konflik ini masing-masing memiliki potensi dan tantangannya sendiri.

Gambar 1: Sumbu Konflik (Sasaran dan Perilaku)

PERILAKU YANG SELARAS	TANPA KONFLIK	KONFLIK LATEN
PERILAKU YANG BERTENTANGAN	KONFLIK PERMUKAAN	KONFLIK TERBUKA

Sumber: Responding to conflict (British Council, Indonesia, 2003)

Dalam scenario ini tidak ada situasi yang ideal, tetapi keempat tipe konflik ini masing-masing memiliki potensi dan tantangannya sendiri. Pada kotak di sebelah kiri atas, menunjukkan: 1) TANPA KONFLIK, artinya masyarakat yang hidup dalam suasana damai harus dapat mengelola konflik secara kreatif. 2) KONFLIK LATEN, sifatnya tersembunyi dan seperti telah disebutkan di atas perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

3). KONFLIK TERBUKA, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. 4) KONFLIK DI PERMUKAAN, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

3. Menekan Konflik

Jika suatu konflik ditekan, maka resikonya masalah baru akan muncul di masa depan. Konflik itu sendiri mungkin saja menjadi bagian dari solusi suatu masalah. Konflik akan berubah menjadi kekerasan jika : 1) saluran dialog dan wadah untuk
mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai, 2). Suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi, 3) Banyak ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas. Trauma yang dialami masa lampau, seperti penderitaan, kekerasan sering menjadi penghalang dalam menangani konflik. Adanya berbagai rintangan dan mata rantai dapat meciptakan keadaan di mana orang terpaksa menggunakan kekerasan. Ketika masyarakat tersisih atau tertindas, mereka mengalami konflik sehingga melakukan tindakan politis yang sulit untuk dikendalikan.

Budaya kekerasan muncul dan berkembang karena konflik selalu ditangani melalui kekerasan.

B. BERBAGAI PENDEKATAN DALAM MENGELOLA KONFLIK

Banyak ragamnya upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Berbagai pendekatan untuk menangani konflik meliputi: (1) Pencegahan konflik,bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras, (2) Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian (3) Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan prilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat, (4) Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha

membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, (5) Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik social dan politik yang kebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari konflik menjadi kekuatan social dan politik yang positif.

Kondisi pendekatan dalam penanganan konflik di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

	Konflik Laten	Konflik di Permukaan	Konflik Terbuka
PENCEGAHAN KONFLIK			
PENYELESAIAN KONFLIK			
PENGELOLAAN KONFLIK			
RESOLUSI KONFLIK			
TRANSFORMASI KONFLIK			

Gambar 2: Pendekatan dalam Berbagai Konflik

Dari gambar 2 tersebut dapat dikemukakan bahwa resolusi konflik lebih mengacu kepada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Oleh sebab itu, intervensi yang tepat akan melibatkan strategi penyelesaian dan resolusi.

C. TEORI-TEORI BERBAGAI PENYEBAB KONFLIK

Ada beberapa teori mengenai berbagai penyebab konflik. Menurut Simon Fisher & Sue Williams (2003) dikatakan bahwa ada 5 teori penyebab konflik, yaitu:

1) ***Teori Hubungan Masyarakat,*** yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah: a) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok

yang mengalami konflik, b) mengusahakan toleransi dan berusaha menerima keragaman yang ada.

2) **Teori Negosiasi Prinsip**, yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah: membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu serta mendorong kemampuan untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan kedua belah pihak dan melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
3) **Teori Kebutuhan Manusia**, yaitu berasumsi bahwa konflik terjadi karena kebutuhan manusia, baik fisik-mental-sosial dan ekonomi yang tidak terpenuhi. Sasaran yang ingin dicapai adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama akan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan untuk menemukan kebutuhan tersebut dan agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
4) **Teori Identitas**, dalam teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam dengan sasaran meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
5) **Teori Transformasi Konflik,** berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah social, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, serta mengembangkan pemberdayaan keadilan.

Dari ke lima teori konflik, dapat disimpulkan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan berbagai upaya dan hal ini berkaitan dengan metode resolusi konflik yang bersifat *"win-win methods*"(Burke, 2000). Strategi dari metode "win-win" menggunakan dua formula dasar, yaitu : *metode pengambilan keputusan yang*

bersifat konsensus dan integrasi. Metode ini disebut juga dengan metode IDM (*Integrative Decision Making*) dengan 6 elemen, yaitu : 1) *review and adjustment of relational conditions, 2) review and adjustment of perceptions, 3) review and adjustment of attitudes, 4) problem solving, 5) search for solution, 6) concensus decision.* Secara lebih jelas, metode "win-win" dapat digambarkan sebagai berikut:

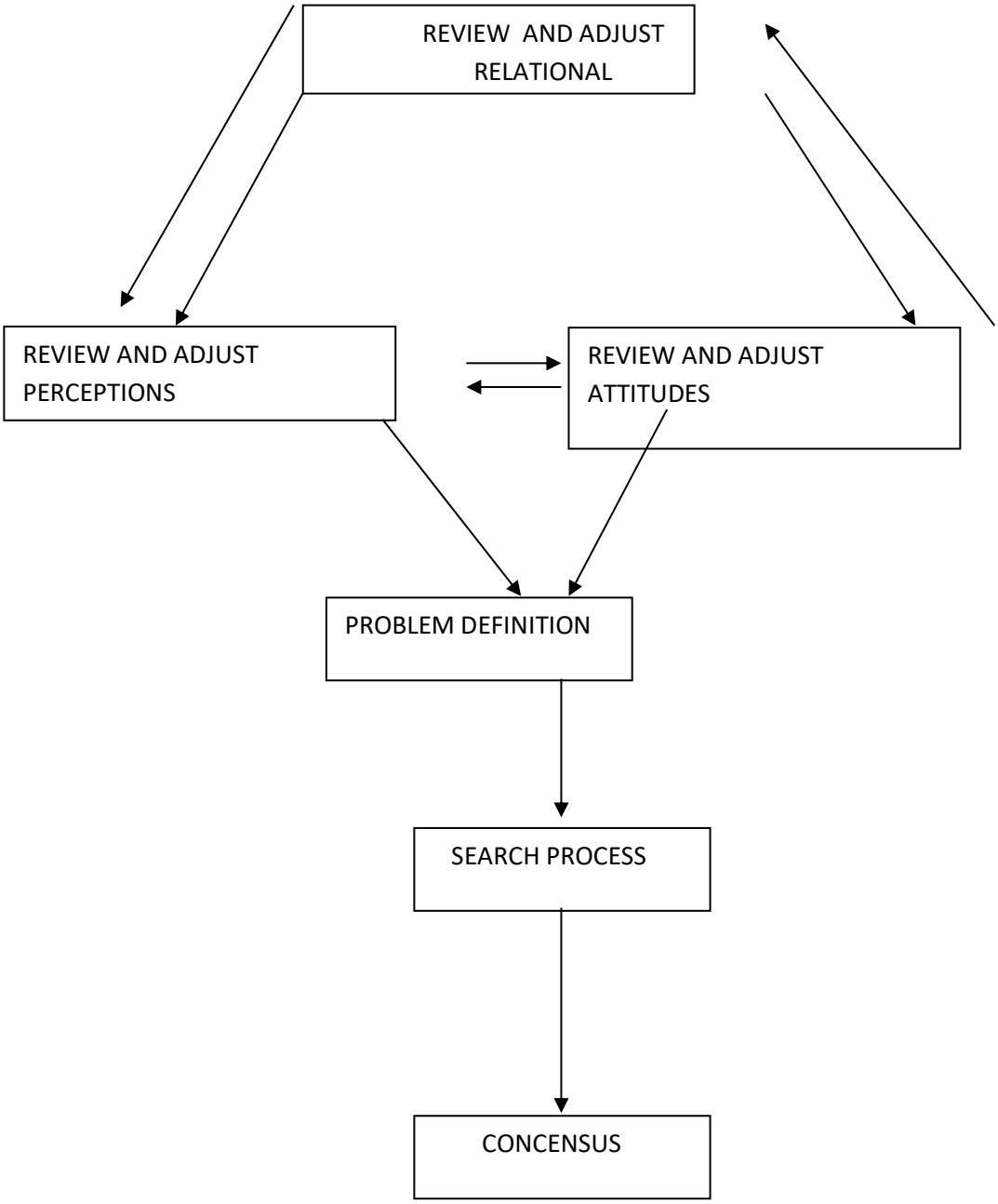

Gambar 3 : Metode Pengambilan Keputusan Integrasi (Burke, 2000)

D. ANALISIS KONFLIK

Analisis konflik adalah suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis, dan sesuai. Analisis konflik diperlukan dengan dasar pemikiran (Richard Smith, 2000) diarahkan untuk: 1) memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian saat ini. 2) mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang dominan saja, 3) memahami pandangan semua pihak atau kelompok dan mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain 4) mengidentifikasi factor-faktor dan kecenderungan yang mendasari konflik. Terdapat beberapa alat bantu untuk menganalisis konflik yaitu meliputi: (1) Penahapan konflik, (2) Urutan kejadian, (3) Pemetaan konflik,(4) Segitiga SPK, (5) Analogi Bawang Bombay, (6) Pohon konflik, (7) Analisis kekuatan konflik, (8) Analogi Pilar, (9) Piramida. Dari keseluruhan alat bantu analisi konflik tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PENAHAPAN KONFLIK

Perlu diketahui bahwa konflik dapat berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui dan digunakan alat bantu lainnya untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Analisis dasar terdiri dari lima tahap yang umumnya disajikan secara berurutan dan mungkin berulang dalam siklus yang sama. Terdiri dari beberapa tahap analisis dasar, yaitu:

a) *Pra-konflik*. Ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara berbagai pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

b) *Konfrontasi*. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah maka akan terjadi tindakan konfrontatif, sehingga akan terjadi pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak dapat dimungkinkan menghimpun kekuatan untuk menghadapi konfrontasi yang mungkin terjadi. Hubungan kedua belah pihak menjadi sangat tegang dan mengalami salah komunikasi yang menyebabkan terjadinya polarisasi di antara kedua belah pihak.

c) Krisis. Kondisi ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi sangat hebat. Dalam konflik skala besar, dapat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan jatuh korban di antara pendukungnya. Pernyataan intimidasi dan saling menuduh dan menentang satu pihak dengan pihak yang lainnya.

d) Akibat. Setiap krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak dapat menekan pihak lain, mungkin terjadi negosiasi dengan atau tanpa perantara. Menuntut campur tangan pihak ketiga sebagai penengah agar pertikaian dan ketegangan dapat dihentikan, dan ada kemungkinan terjadinya penyelesaian.

e) Pascakonflik. Puncak dari konflik dapat diselesaikan dengan baik, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.

2. URUTAN KEJADIAN

Menurut Steve Williams (2003) dikatakan bahwa urutan kejadian adalah suatu alat bantu yang sederhana. Alat ini berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Urutan kejadian menggambarkan kejadian secara kronologis dari sebuah konflik. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang berbeda digambarkan oleh kelompok yang berkonflik sebagai bagian penting dalam memahami konflik.

3. PEMETAAN KONFLIK

Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya (Jawed Luddin, 2001). Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.

4. SEGITIGA SPK (SIKAP – PERILAKU – KONTEKS)

Analisis ini didasarkan pada prinsip bahwa konflik memiliki tiga komponen utama: konteks atau situasi, perilaku, mereka yang terlibat dan sikapnya. Ketiga prinsip ini ditunjukkan secara jelas pada gambar berikut ini:

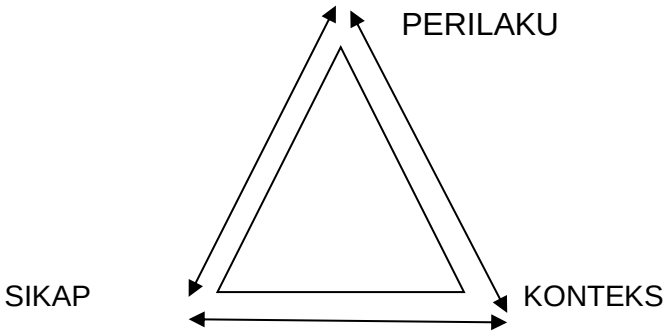

Gambar 4: Segitiga SPK

Ketiga factor tersebut saling mempengaruhi, oleh karena itu tanda panahnya berbentuk dua arah di setiap sudut. Misalnya: sutau situasi yang tidak memperdulikan keperluan suatu kelompok akan menyebabkan sikap frustasi, akibatnya muncul protes. Perilaku ini kemudian mengarah kepada pengingkaran hak (konteks) yang menambah frustasi menjadi lebih besar dan dapat meningkat menjadi kekerasan. Dalam menggunakan segitiga SPK penting untuk mengetahui persepsi yang mendasari dilakukannya analisis.

5. ANALOGI BAWANG BOMBAY

Istilah Bawang Bombay dimaksudkan sebagai lapisan-lapisan yang terbentuk dengan sendirinya. Lapisan paling luar merupakan “posisi-posisi di depan umum”, yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang.Lapisan kedua adalah “kepentingan”, apa yang ingin kita capai dari suatu situasi tertentu. Dan

lapisan terakhir yang merupkan inti adalah “kebutuhan terpenting” yang akan kita penuhi.

6. POHON KONFLIK

Setiap konflik yang terjadi selalu terdiri dari berbagai aspek, yaitu: masalah, penyebab masalah, masalah inti dan efeknya. Dari keseluruhan aspek tersebut seringkali muncul beberapa pertanyaan seperti: Apa yang menjadi penyebab awalnya?, apa yang menjadi masalah intinya, efek-efek apa yang muncul sebagai akibat dari masalah ini? Dan isu apa yang paling penting kita atasi? Pohon konflik menyajikan suatu metode bagi suatu tim, organisasi, kelompok, atau masyarakat untuk mengidentifikasi isu-isu yang masing-masing dipandang penting dan selanjutnya dipisahkan ke dalam empat kategori: 1) masalah, 2) masalah inti, 3) penyebabnya dan 4) berbagai efeknya. Strategi yang dapat digunakan dalam mengelola konflik semacam ini adalah dengan melakukan strategi negosiasi. Negosiasi didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda.

Dalam banyak kasus, negosiasi berlangsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung di antara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, ketika jalur komunikasi antara keduanya belum benar-benar putus atau kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai. Pihak ketiga masih diperlukan di saat berperan sebagai fasilitator untuk membantu komunikasi secara tidak langsung. Fasilitator dapat menyiapkan landasan bagi negosiasi selanjutnya secara langsung. Menurut Sue Williams & Steve Williams (2003) sebagai suatu proses, negosiasi terdiri dari beberapa tahap yang berbeda. Agar suatu negosiasi berhasil, peserta dan fasilitatornya mungkin akan terbantu dengan beberapa tahap berikut ini:

1) Tahap Persiapan
    a. Melakukan analisis situasi konflik dengan cara memetakannya

b. melakukan pendataan atau pengumpulan informasi secukupnya
c. identifikasi berbagai kebutuhan dan kepentingan satu pihak dan pihak lainnya (Analogi Bawang Bombay).
d. pilih alternative terbaik untuk mencapai kesepakatan yang telah dinegosiasi.
e. tentukan waktu yang tepat untuk proses negosiasi, termasuk aturan mainnya

2) Tahap Interaksi:'
   a) lakukan saling berjabat tangan
   b) ungkapkan berbagai pandangan yang berbeda tentang situasi yang sama.
   c) buat kesepakatan tentang issu atau masalahnya
   d) munculkan kemungkinan-kemungkinan untuk menghadapi masalah tersebut.
   e) lakukan evaluasi dan prioritas pilihan yang ada sesuai kebutuhan semua pihak.
   f) kombinasikan pilihan terbaik untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat
3) Tahap Penutupan:
   a) sepakati pilihan terbaik
   b) susun rencana tindakan untuk semua pihak
   c) tentukan waktu dan batas waktu untuk melakukan tindakan
   d) rencanakan waktu untuk kaji ulang kesepakatan yang telah diambil

Dari keseluruhan pentahapan negosiasi di atas dengan tujuan supaya proses negosiasi ini dapat berlangsung dengan baik dan semua pihak memiliki komitmen kearah penyelesaian yang dapat memenuhi semua kebutuhan yang disepakati semua pihak. Hal ini bukan berarti bahwa salah satu pihak harus mengalah terhadap tuntutan pihak lain, tetapi tentu memerlukan kesediaan untuk mempertimbangkan dan menggabungkan berbagai pilihan secara kreatif dalam mencari penyelesaian yang diinginkan.

Dalam melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik diperlukan bantuan untuk strategi negosiasi yang efektif, antara lain: 1)mendengarkan dan komunikasi (pendapat orang lain, member dukungan, dan alternative pilihan), 2) membangun hubungan, yaitu harus bisa membedakan antara orang dengan perilakunya, dapat memberi pengaruh kepada orang lain, membangun kepercayaan, dan memberi jaminan yang terbaik, 3) menyelesaikan masalah, berkat yang terbaik yang dapat memberi kepuasan semua pihak. 4) mencapai kesuksesan, harus ada kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah, kemauan semua pihak untuk menjajagi segala kemungkinan, menerima aturan main, konsisten dan ada jaminan kedua belah pihak.

E. SUMBER KONFLIK DAN BENCANA SOSIAL

International Strategy for Disaster Reduction-United Nations mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi system masyarakat yang mengakibatkan kerugian berskala besar yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri. Dalam UU RI Nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana mengemukakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam atau factor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. UU N0 24/2007 membagi bencana menjadi tiga jenis,yaitu: bencana alam, bencana non-alam dan bencana social. Bencana social merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti terror dan konflik social.

Dengan kata lain, bencana adalah sutau peristiwa yang terjadi akibat factor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya bencana

banjir, tanah longsor, konflik masyarakat dan lain-lain. Konflik social merupakan suatu hal yang tak terelakkan dalam masyarakat yang terdiri dari adat istiadat, tingkat social ekonomi dan sebagainya. Konflik social dapat menjadi bencana ketika telah menjadi kekerasan dan kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana umum dan tempat tinggal serta trauma psikologis.

Dikatakan sebagai bencana social sebab konflik timbul sebagai akibat dialektika tesis-antitesis-sintetis dalam perspektif perkembangan juga kemunduran peradaban manusia. Kriesberg (1998)mendefinisikan konflik sebagai: *" two or more persons or groups manifest to belief that they have incompatible objectivities"*. Aman Saputra (2009) mengatakan konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses social.

Konflik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti kepentingan ekonomi, nilai, status, kekuasaan, otoritas dan sebagainya. Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek seperti adanya perubahan social, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan dan perbedaan cultural. Dalam penelitian ini, terjadinya konflik lebih disebabkan oleh perubahan social dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri. Intinya, dengan terjadinya konflik maka lahir dinamika baru, dengan konflik kreativitas muncul.

Berkaitan dengan model resolusi, maka teori Human Relations George Mills disebutkan bahwa konflik akan besar sumbangannya dalam mencegah kebekuan social (dalam Millah Saeful, 2012). Jika pada kenyataannya terjadi benturan-benturan nilai yang ada dalam masyarakat, maka hal itu tidak akan mengarahkan terciptanya new equilibrium (Effendi, 2002). Oleh karena itu, menurut Durkheim dalam kehidupan social perlu adanya solidaritas social yang terbentuk dalam masyarakat sebagai proses keseimbangan.

Menurut Dahrendorf untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (consensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui consensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan, sehingga

tidak terjadi konflik yang menjadi bencana sosial. Model resolusi Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi, sehingga melahirkan model resolusi litigasi, model non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrasi). Terdapat sebuah anggapan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran dari teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Sementara itu, menurut Littlejohn (2002), menyatakan bahwa suatu kelompok memiliki kehidupannya sendiri lengkap dengan segala adat kebiasaan, norma dan kontak social yang efektif dengan anggotanya. Dalam proses penyelesaian konflik tersebut, unsure komunikasi tidak lepas dari model tersebut, baik model litigasi maupun model non-litigasi.

Pengertian konflik dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada konflik yang bersifat pada wujud perbedaan dan pertentangan kepentingan khususnya ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Prayogo (2004) mengatakan bahwa konflik antara pemerintah, korporasi (perusahaan) dan masyarakat bukan untuk saling menjatuhkan melainkan untuk mendapatkan keputusan dan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, konflik sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negative, hal ini karena melihat dari dampak dari konflik yang bersifat kekerasan sering menunjukkan kerusakan dan kerugian yang bersifat materi dan non materi. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat traumatic dan mengganggu stabilitas atau keserasian yang menjadi cita-cita ideal masyarakat. Sardjono (2004) menawarkan delapan aspek prosedur umum dalam penyelesaian konflik, yaitu:

1. *Lumping it*, terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bertikai untuk menekankan tuntutannya. Dengan kata lain, isu yang dilontarkan diabaikan dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. Prosedur ini dilakukan karena penuntut (claimants) kekurangan informasi atau akses

terhadap hokum dan peraturan yang berlaku dan menganggap keberhasilan tuntutan akan rendah dan atau biaya yang dikeluarkan untuk itu terlalu besar atau tidak sebanding dengan pencapaian hasilnya.

2. *Avoidance atau exit*, yaitu mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Di sini, dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (powerlessness) salah satu pihak ataupun alas an-alasan biaya social, ekonomi atau psikologi.
3. *Coercion*, yaitu suatu pihak yang bersengketa menerapkan hasrat pada pihak lain. Bisa saja penerapannya dilakukan dengan ancaman atau paksaan, sebagaimana banyak terjadi di masyarakat.
4. *Negotiation*, yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Pemahaman ini mencakup penyelesaian masalah secara kolaboratif dan negosiasi.
5. *Concilliation*, yaitu mengajak kedua belah pihak yang bertikai untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Konsiliator memberikan konteks negosiasi seperti tempat, fasilitas pendukung dan akan bertindak sebagai perantara.
6. *Mediation*, adalah pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator dapat ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
7. *Arbitration*, jika pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan siap menerima keputusan apapun.
8. *Adjudication*, jika terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil, baik yang diharapkan ataupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi berlaku seperti dalam pengadilan.

F. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau **Corporate Social Responsibility** (CSR) adalah suatu konsep bahwa **organisasi**, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab

terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap masyarakat sekitar, yang mengakibatkan ketidak nyamanan ataupun menimbulkan kecemburuan social akibat tidak ada kepedulian dari pihak perusahaan atau ada kepedulian tetapi tidak sepadan dengan harapan masyarakat atau membiarkan bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat akibat dari aktivitas perusahaan menjadi focus dari program CSR.

Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan.

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial.

Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik di mata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan

partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukanlah sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.

Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal ...."dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini.

Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama....setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut "

G. PELAKSANAAN PROGRAM CSR (Corporate Social Responsibility)

1. Konsep Dasar Pelaksanaan CSR

LIfe (1995) mengemukakan beberapa prinsip Comdev (Community Development) dapat dijadikan sebagai pelaksanaan program CSR, yaitu: a) **pembangunan terintegrasi,** kegiatan pembangunan masyarakat haarus merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi aspek social, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan spiritual.

Dengan kata lain, bila kegiatan pembangunan masyarakat difokuskaan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitannya dengan aspek-aspek lainnya, b) **penghargaan akan hak azasi manusia;** harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia hidup secara layak dan baik, c) **keberlanjutan**; harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang non-renewable harus diminimalisir untuk kepentingan generasi berikutnya. Kegiatan pembangunan tidak amenimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan tidak hanya untuk kepentingan

sesaat, , d) **pemberdaayaan.** Pemberdayaan merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat.

Menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, e). **Meningkatkan rasa percaya diri**; tidak menggantungkan diri kepada dukungan dari luar, f) **Proses yang terintegrasi**; tidak hanya mementingkan hasil, namun juga memperhatikan proses. Secara grafis, konsep dasar pelaksanaan CSR dapat dikemukakan pada gambar berikut ini:

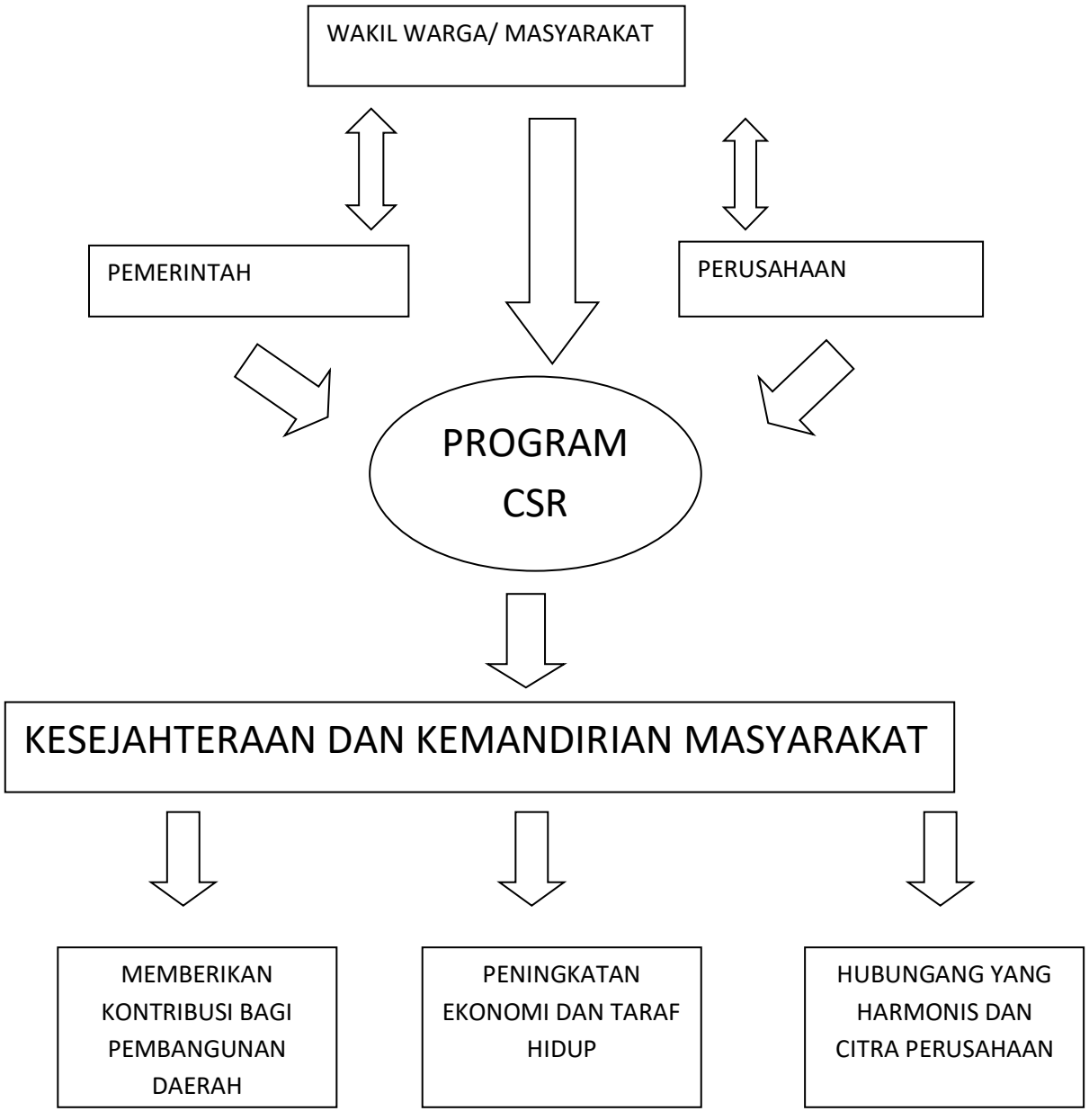

Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, teknik, strategi yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar, g) **Kooperatif**; membutuhkan struktur yang kooperatif dan harmonis tanpa kekerasan, saling menguntungkan, melengkapi dan saling belajar, h) **Partisipasi,** memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan tujuan setiap orang dapat terlibat secara aktif didasarkan pada kesanggupan masing-masing, i). **Sesuai kebutuhan**: harus sesuai dengan kebutuhan nyata dari komunitas local, sehingga bersifat bottom-up dan bukan karena kehendak agen pembaharu, j) **Menjauhkan kekerasan**; bukan merupakan paksaan yang menimbulkan gegar budaya (culture shocks), namun menghargai nilai-nilai dan mengembangkan saling pengertian (mutual understanding). Konsep CSR mulai dikenal sejak tahun 1990 an sebagai standar etik bagi perusahaan, ketika dilakukan konferensi tingkat tinggi bumi di Rio De Janeiro, Brasil. Hingga saat ini konsep dan praktek CSR masih menjadi topic hangat di Tanah Air penuh dengan kontroversi. Perusahaan beranggapan bahwa tanggung jawabnya telah dipenuhi dalam bentuk kewajiban perusahaan menyetorkan sebagian pendapatannya kepada pemerintah.

Tabel 1: Indikator Pembangunan Masyarakat

ASPEK KAJIAN	KETERANGAN
Ruang Lingkup	Kelompok/ Komunitas
Pendekatan	Bottom-Up
Perencana	Komunitas local
Jenis Perubahan	Perubahan Berencana
Peran Agen Pembaharu	Edukator, fasilitator, motivator
Proses	Edukatif,demokratis, partisipatif
Metode	Partisipatif
Tujuan	Memperbaiki social ekonomi/kualitas hidup
Luaran	Empowermant, sustainability, self-reliance

Sumber : Battens T.R.(1957; Rothman, Jack (1995 dan Ife (1995)

Watts (1998) mengatakan: “ CSR is not a cosmetic, it must be rooted in our valued. It must make difference to the way we do our business” Dalam aplikasi di lapangan, CSR yang merupakan wujud tanggungjawab social perusahaan terhadap pembangunan masyarakat masih banyak dilakukan karena factor belas kasihan (charity) atau dilakukan karena keterpaksaan. Sebagai belas kasihan karena perusahaan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin ala kadarnya tanpa memandang sebagai wujud tanggungjawab sosialnya. Dan sebagai paksaan, kaena bantuan baru menyusul kemudian diberikan setelah adanya aksi protes dari masyarakat. Oleh karena itu, CSR tidak boleh dihindari oleh perusahaan sebagai tuntutan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian yang sudah dilakukan terdahulu berkaitan dengan CSR pada umumnya memandang segala program pembangunan atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk perbaikan kehidupan komunitas local adalah identik dengan CSR. Malahan hanya berupa bantuan dana uang oleh perusahaan , baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dianggapnya sebagai program CSR. Implementasi program CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan tambang dan perkebunan, dipandang sebagai program CSR walaupun program tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan prakarsa/inisiasi dan kebutuhan masyarakat local.

Konsep yang benar dalam pelaksanaan program CSR bukanlah program yang hanya dilakukan oleh perusahaan, namun program yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan, komunitas local dan pemerintah.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu memperoleh gambaran secara mendalam dan holistic, memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya (Nasution, 1988; Lexy Moleong, 2000). Peneliti bermaksud mengkaji persoalan yang muncul dari dan dalam masyarakat dan berupaya menemukan alternatif disain managemen resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan kasus konflik yang terjadi di masyarakat dalam program CSR di Kalimantan Timur.

B. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan FGD (*Focus Group Discussion*), studi literature dan dokumentasi. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam didukung dengan FGD (*Focus Group Discussion*).

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam yang diperoleh langsung dari pihak Distamben dan Disbuntanakan Kabupaten/ Kota, yang meliputi Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara, Distamben Kota Samarinda, Disbuntanakan Kabupaten Paser, Disbuntanakan Kutai Barat, CSR perusahaan batubara dan sawit, kemudian pihak Kecamatan, Kelurahan, perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang memiliki konflik dengan masyarakat, sehingga tidak menunjukkan kearmonisan pelaksanaan CSR serta tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, seperti tokoh masyarakat/adat dan LSM (opinion leaders), sebagai key informan.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa monograf, data kuantitatif dan data lainnya yang digunakan untuk memperkaya dan memperkuat hasil wawancara, observasi lapangan.

C. Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pola purposive sampling, menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Daerah yang paling banyak memiliki ijin konsesi pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, 2) Daerah ring 1, yaitu daerah/wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk, 3) Areal tambang dan perkebunan sawit yang memiliki konflik dengan masyarakat sekitar areal tambang dan perkebunan. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan mengembangkan informan melalui snowball sampling dan melalui proses trianggulasi untuk meningkatkan kredibilitas data.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat interpretative, yaitu menjelaskan makna di balik peristiwa yang ada di lapangan (Suharsimi Arikunto, 2006). Penelitian ini juga merupakan studi kasus yang dapat member nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang sebuah fenomena individual, kolektif, organisasi, dalam aspek social dan politik (Robert K. Yin, 2002).

Peneliti bermaksud mengkaji permasalahan konflik yang muncul dari dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanan program CSR menuju harmoni social dan berupaya menemukan alternative disain

managemen resolusi konflik yang mendorong perubahan menuju masyarakat yang sejahtera.

Kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi, yaitu mencek kebenaran data dari setiap aspek dalam draft disain managemen resolusi konflik berdasar dari sumber FGD yang dapat dipercaya

D. Matriks Metode Pengumpulan Data

Tabel 2 : Matriks Metode Pengumpulan Data

TUJUAN	INDEPTH	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
Mencari data dimensi Konflik	Alat: pedoman wa- Wancara	Hasil wawancara, Hasil observasi, hasil FGD dan dokumentasi	Substansi: data pe- nunjang terkait dgn Aspek konflik dan Masyarakat loka
	Substansi seluruh in formasi berkaitan dengan konflik.	Prosedur: field-note, foto, rekam kegiatan	Sumber: seluruh instansi yang berkaitan dgn substansi konflk
	Responden: seluruh Komponen yang ada Dalam ranah konflik	Substansi: infor- masi lain terkait dengan aspek kon flik	
	Pemilihan responden: Purposive sampling,		

	Snowball sampling.		
Mencari data untuk Merancang disain Managemen resolusi konflik	Alat:pedoman wawancara	Alat:pedoman ob servasi dan doku-mentasi	Substansi: data penunjang berkaitan Dengan konflik
	Responden: komponenyang terli-bat dalam konflik	Prosedur: fieldnote, foto, rekam kegiatan	Sumber; Pemda, perusahaan, masyarakat local, LSM
	Pemilihan responden: Purposive sampling, Snowball sampling.	Substansi: infor-masi lain terkait dengan aspek konflik	

Sumber: Patton, 1990; Newman, 1997; Cresswell, 1997

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan diskusi dalam tim peneliti terhadap aspek-aspek yang ada di dalam disain dengan mempertimbangkan hasil FGD, berupa masukan/ saran/ kritik, yang selanjutnya menetapkan komponen dalam disain secara menyeluruh dari hasil FGD yang ada menjadi disain baku yang diharapkan mampu memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini akan disajikan deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara dan diskusi dalam forum group discussion (FGD) di daerah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua daerah ini menjadi tempat FGD dengan alasan di dua daerah ini yang paling banyak ditemui masalah konflik di kawasan pertambangan Batu bara dan perkebungan kelapa

sawit. Deskripsi dalam bab ini meliputi: 1) deskripsi hasil validasi ahli yang telah dilakukan oleh validator dari universitas Gadjahmada Jogyakarta, 2) deskripsi hasil FGD di dua kabupaten (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara), 3) deskripsi penetapan dan pembakuan draft disain resolusi konflik menjadi disain resolusi konflik.

A. HASIL VALIDASI AHLI TERHADAP DRAFT DISAIN MANAGEMEN RESOLUSI KONFLIK

Validasi dilakukan dengan mengacu kepada proposal lanjutan tahap II dan laporan kemajuan penelitian MP3EI pada tahun atau tahap II. Proses validasi diarahkan secara khusus pada draft disain resolusi konflik yang akan digunakan sebagai model pemecahan masalah atau resolusi konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan terhadap draft disain resolusi konflik oleh ahli yang dalam hal ini adalah ahli dalam bidang sosiologi dari Universitas Gadjah Mada Jogyakarta dan selama pertemuan yang dilakukan menunjukkan bahwa draft disain secara umum dinyatakan sudah baik. Namun terdapat beberapa catatan revisi yang diberikan oleh validator berkaitan dengan penyempurnaan draft disain.

1. Usulan terhadap penyempurnaan judul terkait validasi ahli dan uji coba empiris, lebih difokuskan pada aspek pengembangan disainnya.
2. Konsep “charity” dalam program CSR sebaiknya lebih ditelaah secara mendalam melalui perencanaan yang dibuat oleh setiap perusahaan secara lebih konkrit
3. Isu yang dominan dalam konflik yang terjadi, lebih mengena jika dilihat dari sisi lingkungan, misalnya: kerusakan lingkungan, kemiskinan masyarakat sekitar, konservasi SDA dan reklamasi lahan untuk food-estate.

4. Harus jelas, membedakan status perusahaan serta proses perijinannya
5. Tujuan penelitian dan rumusan masalah lebih diluruskan supaya lebih sinkron dan linier
6. Alat atau instrumennya perlu dispesifikkan, jangan terlalu luas perlu disesuaikan dengan kategori konflik yang diteliti.
7. Usulan literature dari Jekson Malik (2003) berjudul: " Menyeimbangkan Kekuatan, pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik SDA" dipandang memberikan referensi yang baik

Dari beberapa catatan di atas, selanjutnya peneliti melakukan revisi disesuaikan dengan saran yang diberikan terhadap draft disain resolusi konflik yang ada. Semua saran revisi yang diberikan oleh validator di atas, peneliti pandang sebagai aspek yang penting untuk diperhatikan, sebab akan menjadi fokus perhatian dalam penyempurnaan draft disain. Berdasarkan hasil revisi yang telah dilakukan dan memperoleh persetujuan dari validator, selanjutnya disain tersebut akan dipakai sebagai bahan kajian dalam forum FGD di daerah sampel penelitian.

Rencana pelaksanaan FGD telah dirancang dengan mengundang seluruh unsur yang kompeten dalam bidangnya dan terkait dengan permasalahan konflik yang terjadi.

B. HASIL FGD (FORUM GROUP DISCUSSION) DENGAN STAKEHOLDERS DI DAERAH (KUTAI BARAT DAN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN PASIR)

1. Realisasi Program CSR oleh Perusahaan di lapangan

FGD dilakukan di daerah sampel melibatkan semua elemen (dari dinas pertambangan, dinas perkebunan, dinas peternakan, perusahaan tambang batubara yang berasal tambang jenis ijin PKB2B dan perusahaan berijin IUP (Ijin Usaha Pertambangan). FGD di BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kutai Barat FGD di Kabupaten Kutai Barat dilakukan di Badan Lingkungan Hidup dihadiri sebanyak 20 orang. Terdiri dari : 5 orang dari BLH, 4 orang dari perusahaan tambang batu bara (P.T. Turbaindo Mining, P.T. Kideco), 2 orang dari Dinas Pertambangan Kubar, 2 dari Disbuntanakan, 2 orang dari perkebunan kelapa sawit, 2 orang dari kepala desa, 2 orang tokoh masyarakat, dan 1 dari LSM.

FGD pada tahap 2 dilaksanakan di BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara. FGD di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan di Badan Lingkungan Hidup dihadiri sebanyak 14 orang. Terdiri dari : 3 orang dari BLH, 4 orang dari perusahaan tambang batu bara (P.T. Kitadin 2 orang, P.T. Jembayan Muarabara 2 orang), 1 orang dari Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, 1 dari Disbuntanakan, 2 orang dari perkebunan kelapa sawit, 2 orang tokoh masyarakat, dan 1 dari LSM.

FGD dilaksanakan selama 3 jam (mulai jam 10.00 – 13.00) dibuka oleh kepala BLH Kubar, begitu pula dengan FGD di Kukar, dilanjutkan dengan penjelasan umum dari peneliti terkait dengan tujuan utama dari FGD. Penjelasan dilakukan secara lengkap terkait dengan penelitian ini hingga menghasilkan draft disain resolusi konflik yang secara teoritik diadopsi dari Burke & Simon Fisher, (2003), selanjutnya disesuaikan dengan kondisi konkrit di lapangan dengan segala permasalahannya.

Draft disain disampaikan ke peserta untuk diberi masukan/saran/kritik dalam upaya penyempurnaan dan mencari disain yang baik dan baku serta siap untuk diaplikasikan di lapangan, yaitu di daerah pertambangan dan perkebunan yang memiliki permasalahan atau konflik dengan masyarakat dan/atau pemerintah.

Dari keseluruhan proses FGD,baik yang dilaksanakan di Kutai Barat maupun di Kutai Kartanegara, input dan saran muncul dari semua pihak yang terkait langsung dengan kepentingan ini. Respon dari peserta cukup antusias, seluruh peserta memberikan komentar dan pendapatnya, terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik dan program CSR yang selama ini telah dilakukan oleh banyak perusahaan di kedua Kabupaten tersebut.

Menurut kepala BLH Kutai Barat, dalam saran pendapatnya dikatakan bahwa :

sumber dari seluruh permasalahan konflik yang sering terjadi di masyarakat disebabkan oleh karena tidak dijalankan prosedur penyelesaian masalah yang disebutnya dengan istilah :"KIS" (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi). "*.....selama ini kasus itu terjadi marak di perusahaan dan masyarakat sekitar, karena tidak mau duduk bersama menyelesaikan masalah....yaitu tidak mau melakukan koordinasi yang baik, melaksanakan integrasi atau menyatukan pendapat dan membina keharmonisan yang menguntungkan semua pihak*", demikian ungkapnya. Hal ini disampaikan karena menurutnya didasarkan kepada pengalaman yang telah dijalani selama masa jabatannya sebagai kepala BLH dalam menangani amdal di Kabupaten Kutai Barat.

Masukan ini dinilai baik oleh semua peserta, sebab dengan KIS semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, masukan dari kepala BLH inipun menjadi salah satu point untuk di masukkan dalam disain sebagai bagian dari pemecahan masalah yang bersifat rekonsiliasi. Ketika dimintakan pendapat kepada peserta,

semua peserta sepakat untuk menggunakan prosedur “KIS” sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah konflik yang terjadi.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak BB, dari P.T. Kitadin mengatakan bahwa :..”sebenarnya aturannya sudah jelas dan sudah tercantum dalam perundang-undangan, namun dalam praktek di lapangan selalu menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun ditambahkan oleh bapak BB:...” jika terjadi penyimpangan di lapangan toh juga tidak ada teguran atau peringatan dari pemerintah, alias dibiarkan saja”, demikian ungkapnya. Oleh karena itu, antara pemerintah setempat dan pihak perusahaan dikatakan perlu mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan di lapangan dan pemahaman terhadap Undang-undang yang ada. Ditegaskan lagi bahwa komitmen perusahaan harus jelas dan transparan terkait dengan budget, besaran dana dan aperuntukannya.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, bapak BB juga menyarankan sebaiknya dilakukan rembug dan duduk bersama dengan melibatkan masyarakat setempat. Pola ini sama dengan peserta dari Kubar, perlunya “KIS”.

Pendapat lain yang muncul dari pihak dinas pertambangan (bapak NH) menyampaikan bahwa perencanaan program CSR semestinya harus didahului dengan proses “social mapping”. Hal ini menurutnya penting sebab selama ini perencanaan atau program CSR semata-mata hanya dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melihat secara jeli apa kebutuhan pokok masyarakat sekitar perusahaan. Maka, untuk melihat kebutuhan masyarakat diperlukan survey ke lapangan terkait kebutuhan mendesak bagi warga setempat.

Sebagai contoh dikatakan oleh bpk NH: “ *misalnya tentang dana yang diberikan perusahaan untuk sewa bis yang dipakai untuk piknik, atau membantu warga dalam khitanan massal, ini kan tidak urgen dan tidak menyentuh kesejahteraan warga*”, demikian ungkapnya.

Disebutkan bahwa kasus serupa terjadi hampir di semua tempat di lingkungan perusahaan. Terkesan hanya berorientasi pada menyenangkan warga untuk sesaat. Dengan demikian, maka pendapat tentang perlunya "social mapping" ini secara tidak langsung mendukung konsep KIS di atas

Berkaitan dengan kebutuhan warga masyarakat, maka menurut bpk AZ, dari P.T. TSA, sebuah perusahaan kelapa sawit, disarankan agar dalam perencanaan pembangunan di daerah melibatkan pihak Bappeda setempat, sebab dikatakan bahwa seluruh perencanaan pembangunan pemda ada di Bappeda. Menurutnya, keterlibatan Bappeda memberi kepastian program yang memang merupakan program BKD di daerah. Dikatakan: ".....*hendaknya melibatkan Bappeda saja, agar semua program terarah dan jelas terkait dengan kebutuhan daerahnya*", demikian ungkapnya.

Berdasarkan usulan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menyusun program CSR semestinya melibatkan unsur pemerintah, agar usulan warga dapat diserap dalam perencanaan pembangunan khususnya pembangunan desa.

Menurut peserta dari dinas perkebunan Kukar, terkait dengan konflik yang sering terjadi, dikatakan masih diperlukan pola litigasi, sebab di lapangan ada kelompok tertentu yang sering menggunakan kesempatan untuk menuntut hal yang sama sebab terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan atau areal. Menurutnya, kadang-kadang konflik sengaja diciptakan atas dasar kepentingan seseorang atau kelompok tertentu, sehingga proses jalur litigasi masih diperlukan.

Dengan demikian, usulan tersebut nampak mendapat dukungan sebagian besar peserta FGD, sehingga tetap akan dipakai sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah konflik di samping prosedur non-litigasi.

Penanganan konflik sangat diperlukan, sebab menurut yang bersangkutan selama ini pemerintah hanya mengatur hal-hal apa yang

diperbolehkan atau dilarang. Sedangkan penanganan konflik sampai saat ini masih terabaikan.

Atas dasar saran tersebut, dapat diartikan bahwa disain resolusi konflik sangat diperlukan untuk mendukung penyelesaian setiap konflik yang terjadi di sekitar tambang dan sawit. Hal tersebut juga ditegaskan oleh bapak HS, dari perusahaan tambang P.T. Mega Prima Persada, bahwa seluruh bantuan dari perusahaan, baik dalam bidang pertanian, peternakan, maupun bantuan pembangunan infrastruktur disertai dengan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat.

Seiring dengan bantuan kegiatan CSR tersebut, dari pihak LSM mengharapkan agar perusahaan melakukan kajian lapangan agar tepat sasaran, juga harus melakukan reklamasi tambang, penyiapan tenaga kesehatan (K3), juga perlu ada perhatian terhadap kelestarian keragaman hayati khas Kalimantan. Dari beberapa saran tersebut, maka salah satu saran yang mendukung disain adalah pelestarian keragaman hayati yang dalam disain diberi istilah : konservasi sumber daya alam.

Salah seorang tokoh masyarakat menekankan agar perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, dan usulan dalam disain perlu dimasukkan unsur : " saksi" terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, ditambahkan oleh peserta dari Disbuntanakan bahwa masalah konflik hendaknya diurutkan mulai dari yang masalah kecil hingga masalah besar, agar penyelesaiannya tuntas, serta perlu ada evaluasi setiap tahunnya.

2. Kurangnya sosialisasi kegiatan CSR di Masyarakat

Pada prinsipnya kalau dilihat dari program kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan tambang batu bara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah cukup banyak kegiatan di masyarakat. Hanya masalahnya adalah kegiatan tersebut sekedar kegiatan yang tidak sampai menyentuh kesejahteraan dan juga

banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kegiatan CSR.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan berdampak pada persepsi yang salah terhadap perusahaan. Keberadaan FKM sebagai lembaga di desa yang dibentuk dan diberi kepercayaan untuk menangani CSR belum mampu menjalankan fungsi dan tugas dalam mensosialisasikan kegiatan CSR. Selain itu, tidak kalah pentingnya perusahaan sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan citra yang baik di mata masyarakat juga harus mengambil peran sentral dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosialnya secara langsung kepada masyarakat.

Pernyataan sumber dari perusahaan yang menyatakan bahwa mereka sangat jarang berkunjung ke desa binaan di luar jam kerja membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memang jarang dilakukan. Sehingga, dalam keadaan seperti ini maka pihak perusahaan jarang bertemu langsung dengan warga masyarakat.

Selain itu, menurut beberapa informan bahwa sosialisasi kegiatan CSR masih sebatas sosialisasi pada tahap perencanaan, itupun tanpa mensosialisasikan alokasi dana CSR kepada pemangku kepentingan yang ada. Banyaknya warga masyarakat yang tidak tahu kegiatan CSR di wilayahnya harus segera diatasi dengan memperbanyak itensitas komunikasi dari pihak perusahaan. Lembaga FKM dan LPM selaku lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan CSR didesa harus didorong untuk lebih proaktif mensosialisasikan kegiatan CSR.

Dalam setiap pelaksanaan program CSR terutama bersentuhan dengan kegiatan fisk material, semestinya harus ada papan yang jelas terkait dengan proyek, anggaran, sumber dana dan sebagainya. Kehadiran pihak perusahaan di tengah masyarakat perlu dilakukan secara berkala.

3. Koordinasi yang kurang di antara pemangku kepentingan

Salah satu persoalan yang menjadi penyebab mekanisme proses dari tahapan kegiatan CSR di lapangan tidak berjalan adalah kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan, terutama para pelaksana program CSR. Mekanisme tahapan proses kegiatan CSR yang relatif ideal sebagaimana yang disampaikan banyak responden ternyata tidak benar-benar terwujud dalam praktek di lapangan.

Adanya kegiatan yang dirancang dan dibiayai oleh dana CSR ternyata telah dikerjakan dengan biaya ADD, padahal rencana kegiatan beserta pembiayaannya telah dibicarakan di dalam forum musrebangdes. Oleh sebab itu, dalam forum FGD, wakil dari P.T. Kitadin menyampaikan saran: 1) Koordinasi harus terpusatuntuk menghindari jangan sampai jalan sendiri-sendiri, 2) koordinasi harus terpadu, terlihat ada interaksi semua pihak, 3) Koordinasi harus berkesinambungan, selalu dilakukan secara berkala. 4) Koordinasi harus dilakukan melalui pendekatan multi instansional.

4. Konservasi sumber daya alam yang dilalaikan oleh Perusahaan

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan berpengaruh kepada kehidupan fauna dan flora yang semakin tergerus dan punah. Hal ini terjadi karena perambahan pertambangan dan perkebunan yang tak terkendali, sehingga kerusakan lingkungan menjadi parah.

Kondisi ini dipandang penting untuk menata ulang lingkungan yang sudah terlanjur rusak.dengan cara menggunakan disain sebagai acuan penyelesaian masalah. Masalah yang terjadi sebagai akumulasi dari akibat negatif yang ditimbulkan akibat tambang dan perkebunan sawit. Pelestarian konservasi sumber daya alam dalam forum FGD disepakati oleh semua pihak. Kelangkaan fauna dan flora Kalimantan mengundang keprihatinan semua peserta, sehingga sepakat menjadi salah satu daya dukung pemecahan masalah di masyarakat.

5. Reklamasi yang tidak dilakukan mendorong tumbuhnya food-estate

   Kondisi lingkungan yang rusak akibat tidak adanya reklamasi tambang membuat area bekas tambang tidak dapat difungsikan sama sekali. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar area tambang, maka tindakan reklamasi adalah tanggung jawab perusahaan. Perusahaan berkewajiban mengembalikan area lokasi tambang menjadi area yang berfungsi untuk tanaman agribisnis yang memberikan mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat. Ketidakpedulian perusahaan untuk memfungsikan kembali lahan bekas tambang sering memunculkan konflik dengan masyarakat. Warga merasakan dampak negatif, terjadi banjir, bencana longsor, keracunan akibat zat kimia pupuk, dan kerusakan alam yang lainnya.

6. Sikap Perusahaan yang terlalu Birokratif

Terdapat banyak keluhan yang diungkapkan oleh responden dalam kesempatan wawancara terhadap kegiatan CSR . Dari keseluruhan hasil FGD, baik yang dilaksanakan di Kutai Barat maupun di Kutai kartanegara, dapat disimpulkan terkait dengan masukan/saran untuk model disain resolusi konflik dan diterima baik oleh semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Unsur dari pihak pemerintah yang harus terlibat dalam penyelesaian konflik dan perlu ditambahkan ke dalam disain adalah:
   a. Bappeda
   b. Dinas Peternakan
   c. Dinas Pertanian
   d. Disnaker
   e. Dinas Kesehatan
   f. Disperindakop
   g. Dinas Tata Kota dan Pertamanan
2. Unsur ideal penyelesaian konflik
   a. Win-Win Solution
   b. Non- Litigasi
   c. Litigasi (ditempuh jika ada pihak provokasi)

d. IDM (Integrative Decision Making)

e. KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi)

3. Unsur Penting yang harus menjadi pertimbangan Perusahaan dalam pelaksanaan CSR

a. Social Mapping

b. Pemberdayaan SDM dan SDA

c. Pelibatan Pemangku Kepentinga.

Secara lengkap model disain yang telah mengalami revisi berdasarkan masukan/saran dari seluruh peserta FGD dapat dilihat pada gambar berikut ini:

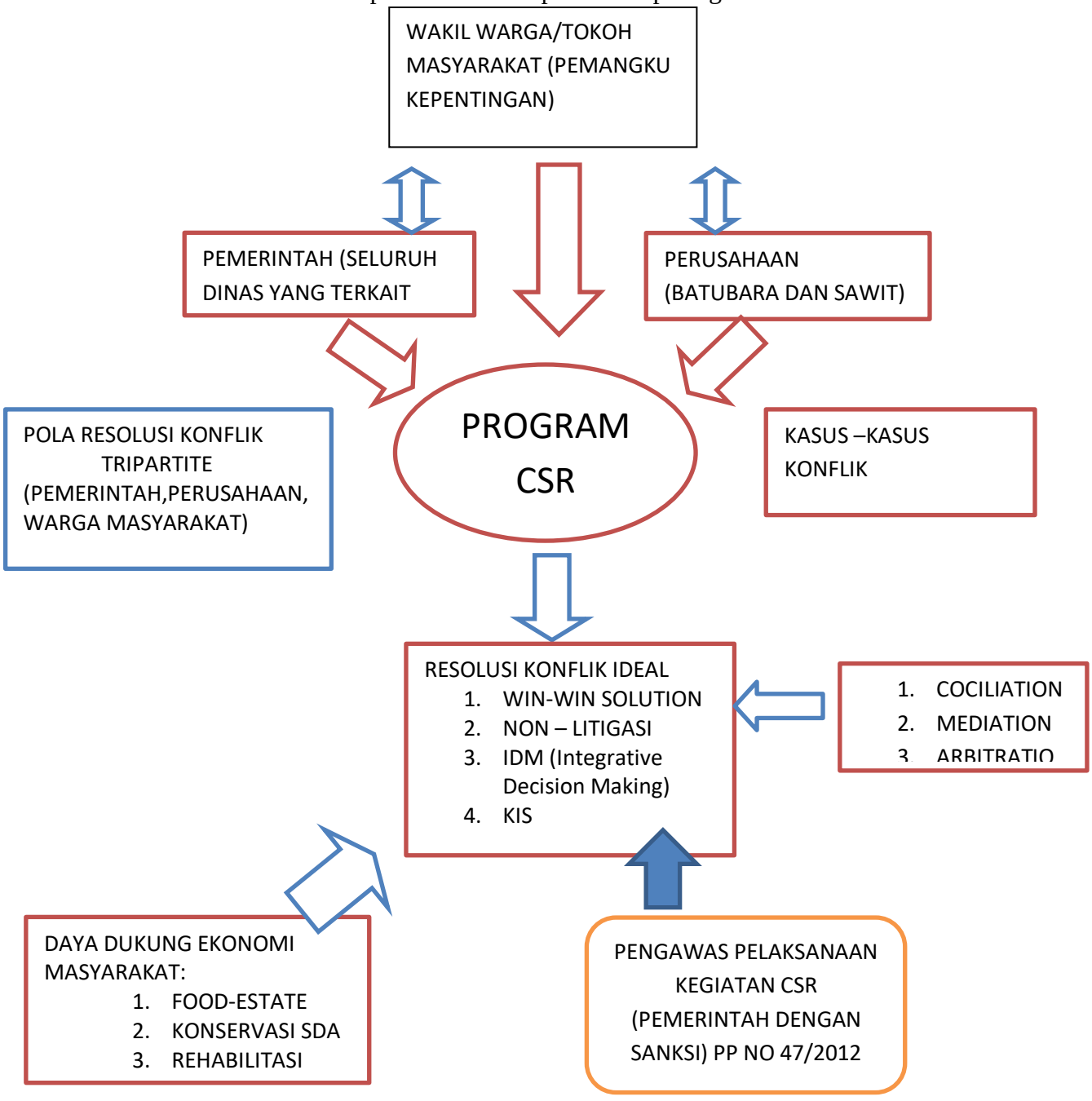

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan terkait dengan masukan, saran dan kritik terhadap disain resolusi konflik,telah ditemukan kunci permasalahan pokok dalam draft disain yang selanjutnya akan dianalisis dan dari analisis ini akan dihasilkan resolusi konflik yang tepat melalui disain resolusi konflik yang sudah disetujui dan disepakati semua pihak dalam forum FGD.

1. Konsepsi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (Comdev atau CD) Dalam Bingkai Konflik Sosial antara Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat.

Berdasarkan hasil FGD di kedua kabupaten, yaitu kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa terjadi kekeliruan di tingkat grass-root (desa-kecamatan) dalam memahami konsep yang sebenarnya dari CSR dan CD (Comdev). Dalam banyak hal di lapangan, kedua istilah itu sering digunakan secara bergantian untuk masalah yang berbeda, karena memang secara konseptual kedua istilah itu memiliki konsep dan batasan yang berbeda.

Fakta di lapangan, warga masyarakat di desa tidak banyak tahu tentang istilah CSR, di mana warga lebih kenal dengan istilah Comdev. Pada umumnya warga lebih

Banyak menyamakan antara CSR dan Comdev, sehingga hanya beda dalam peristilahan saja. Sementara itu, di pihak perusahaan, dalam setiap laporan selalu menggunakan istilah Comdev.

Sebagai contoh, misalnya perusahaan memberi bantuan dana untuk sewa Bus dalam rangka transportasi untuk piknik siswa ke luar kota. Dari contoh yang ada ini menunjukkan ada ketidakpahaman para pelaku CSR dan Comdev. Dengan demikian, terjadi pemahaman yang parsial terhadap konsep CSR secara utuh. Dalam pemahaman yang sebenarnya, Comdev lebih ke arah upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar menjadi lebih dekat kepada karakter kemandirian.

Dari pemahaman tersebut dapat diartikan, bahwa Comdev mengarah kepada kelompok masyarakat yang spesific, yaitu warga yang ri masymengalami masalah (Kartini, 2009). Kesalahan menyamakan konsep CSR dan CD akan berdampak kepada kesalahan dalam menetapkan siapa yang seharusnya masuk dalam kategori masyarakat rentan, kurang beruntung, atau bermasalah yang sebenarnya menjadi pihak yang paling berhak menerima program CD. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa secara oprasional perusahaan membawa dampak negatif bagi mayoritas warga desa di tempat perusahaan beroperasi, terutama bagi warga yang arealnya menjadi daerah yang ditambang sumber daya alamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat rentan, kurang beruntung atas operasinya perusahaan adalah pada umumnya berprofesi sebagai petani di sekitar tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Kesalahan utama yang dilakukan pihak perusahaan, pada umumnya adalah secara prinsipiil, perusahaan memiliki kepentingan yang besar di balik melaksanakan CSR dan Comdev.

Jika dihubungkan dengan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini (bantuan sewa transportasi, membuat jalan desa) , maka kegiatan tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali jika dikaitkan dengan warga yang rentan dan kurang beruntung. Namun demikian, sudah dapat dilihat bahwa perusahaan pada kenyataannya memang telah melakukan kegiatan CSR dengan berbagai program.

Dengan demikian, secara kontekstual dalam arti CSR yang sebenarnya belum terlihat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan comdev yang serius dan terarah. Hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memang belum

memiliki pokok kebijakan CSR yang terarah yang merujuk kepada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat setempat.

Terlepas dari ketiadaan kebijakan dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, satu hal yang pasti bahwa ada aggapan bahwa melakukan kegiatan CSR berarti juga sekaligus melakukan CD.

Hal ini merupakan pendapat yang keliru. Rudito (2003) menyatakan bahwa lingkup program *community developmen*t (CD) dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: Community Service (CS), Community Relation (CR), dan Community Empowering (CE). CS adalah kegiatan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat (ketenagaan, pembangunan jalan, kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah dan sebagainya. CR adalah program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pengembangan swadaya masyarakat, penguatan usaha kecil, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas masyarakat yang berbasis sumber daya setempat. Sedangkan CR adalah kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait seperti: konsultasi publik, penyuluhan.

Secara konseptual, baik CSR maupun CD adalah peran aktif pihak perusahaan sebagai implementasi tanggungjawab sosial dalam upaya membantu transformasi masyarakat sesuai dengan kemampuan perusahaan agar mandiri sejahtera secara kontinu. Idealnya, program CSR dan CD hendaknya dilaksanakan dalam perspektif keharmonisan antara tripartit, yaitu : pemeritah, perusahaan dan masyarakat.

Selanjutnya, sesuatu yang dapat dilihat dari program CSR dan Comdev dari sisi perusahaan adalah dapat membantu upaya mengantisipasi gangguan sosial yang dapat meluas menjadi konflik sosial, sekaligus bukti kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar. Sebagaimana telah terungkap pada FGD dan temuan penelitian bahwa program CSR dari perusahaan masih terbatas pada realisasi yang bersifat "charity" yang belum ada muatan konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang memberi kesejahteraan hidup. Bahkan bukan mustahil, bahwa kegiatan CSR lebih bermotif meredam konflik bernuansa politik terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap potensial mengganggu aktivitas dan sustainabilitas perusahaan.

Dalam sebuah tanya jawab dengan pihak perusahaan menyebutkan bahwa salah satu kegiatan CSR tidak memberi kesan manfaat bagi warga desa dan desanya jika hanya memberi dana sewa untuk transportasi siswa.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kegiatan CSR harus tepat guna dan tepat sasaran bagi warga. Sebagaimana diungkapkan oleh Bowen (Solihin, 2008) menyatakan bahwa kewajiban atau tanggungjawab sosial dari perusahaan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai dari warga masyarakat sekitar.

Satu hal yang harus disadari oleh perusahaan adalah bahwa perusahaan bisa ada karena ada dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai keselarasan dengan masyarakat. Ada kontrak sosial yang berisi hak dan

kewajiban. Kontrak sosial inilah yang akan menjadi wahana bagi perusahaan untuk menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dalam bentuk tanggungjawab perusahaan. Sehingga, seluruh permasalahan konflik yang terjadi dengan masyarakat dan pemerintah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu, model litigasi yang selama ini dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk menyelesaiakan setiap permasalahan konflik dalam masyarakat tidak akan berfungsi dengan baik. Model litigasi justru dipakai untuk melindungi semua pihak, bukan pihak tertentu yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Dengan demikian, model "win-win solution" menjadi penting dalam penyelesaian permasalahan konflik sosial.

Premis yang lain yang mendasari tanggungjawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, agar terjadi keselarasan antara nilai yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai yang dimiliki masyarakat, perusahaan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

2. Penyempurnaan Draft Disain Berdasarkan Masukan dan Saran dalam FGD di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Bingkai Pemberdayaan Masyarakat

Orientasi utama penetapan model disain resolusi konflik dilandasi oleh sebuah tujuan demi keharmonisan, antara pemerintah- perusahaan dan masyarakat sekitar serta keberlangsungan perusahaan itu sendiri, sehingga program-program CSR harus dibingkai dalam sebuah komitmen bersama secara utuh yaitu : pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menuju ke konsep pemberdayaan tersebut, maka setiap masalah atau konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan baik dan dalam suasana damai serta menguntungkan semua pihak.

Agar semua upaya tersebut terlaksana, maka perlu dilakukan dalam sebuah model disain baku yang dapat dipakai sebagai acuan pokok dalam penyelesaian setiap masalah konflik di lapangan. Untuk itu, maka penyempurnaan disain menjadi tugas utama bersama bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari seluruh kegiatan FGD yang sudah berlangsung di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat masukan dan saran yang mendukung tercapainya penyempurnaan disain hingga mencapai finalisasi yang dapat ditetapkan sebagai disain penyelesaian konflik.

Inti pemberdayaan sebagai tujuan pokok tercapainya disain resolusi konflik ini menunjuk kepada sisi kemampuan manusia, khususnya kelompok manusia yang lemah

Sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan dan penderitaan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan;

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

   (Suharto, 2005)

Selanjutnya, Ife (dalam Suharto, 2005) menyatakan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian pokok, yaitu : kekuasaan dan kelompok lemah. Dalam pengertian:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
2. Kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginnannya
3. Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan non-formal
6. Kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa
7. Kemampuan melakukan reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah

kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi , mempunyai mata pencaharian, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Deskripsi tentang konsep pemberdayaan pada masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya untuk mengingatkan para petugas CSR , khususnya yang ada di perusahaan bahwa program CSR dengan konsep pemberdayaan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh secara komprehensip tentang konsep pemberdayaan itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses sekaligus hasil.

Oleh karena itu, kegiatan CSR diharuskan memiliki:

1. Konsep yang terukur secara jelas, di mana tahapan prosesnya dan indikator keberhasilannya sebagai tujuan akhir
2. Sumber daya manusia yang secara khusus menangani program CSR tersebut, sehingga benar-benar fokus dalam menjalankan kegiatannya, terutama dalam hal melakukan kegiatan pendampingan di lapangan.
3. Kesempatan membuka peluang seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat yang akan diberdayakan. Sebab, pada prinsipnya merekalah yang paling tahu terhadap ketidakberdayaannya. Artinya, partisipasi aktif masyarakat yang ingin diberdayakan harus didorong sedemikian rupa, sehingga mereka terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang pada dasarnya untuk menolong diri mereka sendiri.

Akhirnya, program CSR hendaknya dimaknai sebagai kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan bukan sekedar memberi, namun merupakan bagian integral dalam proses perencanaan korporasi yang membutuhkan pertimbangan penting. Secara paraktis, proram

pemberdayaan dapat disesuaikan dengan memperhatikan berbagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan.

Oleh sebab itu, akurasi data berkenaan dengan data kependudukan dan hal-hal yang berhubungan dengannya harus dimiliki oleh perusahaan pelaksana CSR. Di sinilah pentingnya peranan social mapping agar tepat sasaran dan berdaya guna optimal dan terjadi kesesuaian antara kegiatan dan kebutuhan yang menjadi harapan masyarakat.

Program CSR sendiri juga menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan , sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan. Untuk memulai suatu program CSR , maka pihak perusahaan harus berhubungan dengan pemangku kepentingan. Dan perlu adanya identifikasi pihak mana saja yang terlibat dalam program tersebut. Seluruh rancangan harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat yang menjadi sasaran CSR.

Kegiatan CSR dalam implementasinya dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1) Perencanaan
2) Pelaksanaan
3) Pengawasan
4) Pelaporan dan
5) Evaluasi

Dengan demikian, melihat langkah-langkah yang harus ditempuh, maka program CSR pasti melibatkan seluruh komponen, baik unsur dari pemerintahan, dari perusahaan itu sendiri serta dari kalangan masyarakat. Pihak pemerintah melibatkan berbagai unsur: Bappeda, dinas pertambangan, perkebunan, dinas peternakan, dinas pertanian, dinas perikanan dan juga dinas kesehatan. Keterlibatan semua dinas menunjukkan bahwa bidang pengawasan kegiatan CSR perlu dilakukan. Hal ini tidak terpisahkan dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Bantuan ternak sapi seperti yang diberikan oleh P.T. Turbaindo Mining, haruslah ada pengawasan dari dinas peternakan, pertanian dan kesehatan.

Hal ini dimaksudkan agar program CSR dapat dilaksanakan dengan baik dan bersifat keberlanjutan.

Selain mengelompokkan tahapan kegiatan, pemetaan juga dilakukan dengan mengelompokkan para pemangku kepentingan ke dalam 5 akelompok, yaitu:

1. Perusahaan
2. Forum Komunikasi Msyarakat (FKM)
3. Pemerintah Desa (LPM. BPD, PKK)
4. Warga Masyarakat

Namun dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara menytakan bahwa masyarakat sangat jarang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam berbagai tahapan kegiatan CSR di wilayahnya. Menurut mereka, hanya elit desa saja yang terlibat dalam tahapan kegiatan CSR. Pasal 1 ayat 3 UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: "tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya".

Kandungan pasal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab bukan hanya kepada stakeholder, tetapi juga kepada masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi dan mempengaruhi operasional perusahaan. Bahkan perusahaan juga bertanggung jawab kepada lingkungan masyarakat dalam radius yang tak terhingga.

Maria (2012) mengatakan bahwa pemangku kepentingan adalah semua pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan

dan tindakan suatu organisasi". Jones (1995) mengkategorikan pemangku kepentingan dalam kategori inside stakeholders dan outside stakeholders. Inside-stakeholders terkait dengan sumberdaya yang terlibat langsung di perusahaan. Sedangkan outside-stakeholders adalah orang atau pihak yang bukan terkait dengan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, dalam disain resolusi konflik, peran masyarakat sangat penting, sebab dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terpenting akan berpengaruh besar pada kelangsungan perusahaan tersebut dan masyarakat juga paling merasakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Pemetaan para pemangku kepentingan ini akan sangat membantu perusahaan dalam upayanya menjalankan tanggungjawab sosialnya terhadap seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Blair dan Whitehead (dalam Solihin,2008) membangi pemangku kepentingan berdasarkan potensi ancaman dan kerjasama ke dalam 4 tipe, yaitu: *supportive stakeholders, marginal stakeholders, non-supportive stakeholders, dan mixed blessing stakeholders.* Lebih jelasnya dapat dilihat pada gamber berikut ini:

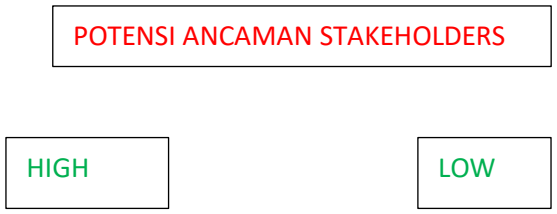

Gambar 2 : Potensi Ancaman dan Kerjasama Stakeholders

Supportive stakeholders adalah pemangku kepentingan yang mendukung berbagai tujuan dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemangku kepentingan tipe ini memiliki ancaman yang rendah dan potensi kerjasama yang tinggi. ***Marginal stakeholders*** adalah pemangku kepentingan yang memiliki ancaman dan potensi kerjasama yang rendah. Dalam konteks ini mereka adalah masyarakat lokal yang tidak terlalu perduli dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan, karena mereka memang kelompok yang tidak menerima dampak negative dan positif dari perusahaan.

Non-supportive stakeholders adalah pemangku kepentingan yang paling memberi tekanan terhadap perusahaan. Kelompok ini memiliki potensi ancaman yang tinggi dan kerjasama yang rendah. Mereka adalah kelompok yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian dari perusahaan. Potensi untuk konflik sangat tinggi dan memberi tekanan ke perusahaan hingga mengganggu operasionalisasi keberlangsungan perusahaan. Kelompok ini biasanya adalah kelompok terbesar, karena potensi untuk dirugikan oleh pihak perusahaan cukup besar. Oleh sebab itu, potensi konflik sangat tinggi, sehingga perlu ditempuh pola penyelesaian konflik yang baik, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Mixed Blessing stakeholders adalah pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman yang tinggi terhadap perusahaan tetapi juga memiliki kerjasama yang tinggi. Kelompok ini adalah pemerintah desa. Dengan demikian, pada dasarnya seluruh tahapan kegiatan CSR sangat bergantung pada managemen pemangku kepentingan. Kerjasama dalam perencanaan kegiatan CSR dalam berbagai pihak pemangku kepentingan akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi, kebijakan dan program-program CSR.

Dengan menetapkan disain yang baik dan memenuhi tuntutan semua pihak, maka program CSR akan menjadi pemberdayaan masyarakat sesungguhnya. Solusi alternatifnya, perlu dikembangkan satu strategi umum managemen para pemangku kepentingan (Solihin,2008). Dengan dasar ini, maka sangat tepat perlu ditetapkan disain resolusi konflik yang baku untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang ada.

Berdasarkan tipologi para pemangku kepentingan, maka sedikitnya ada 4 strategi dalam managemen, yaitu:

Pertama, perusahaan melibatkan pemangku kepentingan yang mendukung di dalam berbagai isu yang relevan, sehingga memaksimalkan potensi kerjasama. *Kedua,* perusahaan melakukan pengawasan terhadap pemangku kepentingan marginal dan perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan isu yang akan meningkatkan potensi ancamanbagi perusahaan.

Ketiga, perusahaan melakukan strategi bertahan terhadap serangan kelompok nonsupportive dengan cara mengurangi ketergantungan kepada kelompok pemangku kepentingan tersebut. *Keempat,* perusahaan melakukan kolaborasi denan kelompok mixed blessing stakeholders, sehingga akan mengurangi ancaman bahkan berubah mendukung.

Singkatnya, dengan strategi yang tepat dengan menggunakan disain resolusi konflik yang sudah disepakati dan disetujui, program CSR perusahaan pasti akan mendapat dukungan luas dari masyarakat luas.

4. Mekanisme Perencanaan Program CSR yang Ideal Berkontribusi Kepada Penetapan Disain Resolusi Konflik Berdasarkan Hasil FGD

Berdasarkan harapan dan kajian teori ideal dalam penyusunan perencanaan , program CSR, dalam forum FGD diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Adanya platform anggaran CSR dari pihak perusahaan, 2) Penyusunan usulan program di tingkat desa melibatkan RT, FKM, tokoh masyarakat, warga, 3) Usulan yang telah disepakati di tingkat desa diajukan ke Pemdes sesuai platform anggaran yang tersedia, 4) Setelah menerima usulan dari tingkat desa, selanjutnya pemdes menindaklanjuti dengan melakukan pemetaan potensi terkait dengan usulan yang disampaikan oleh desa, 5) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan kegiatan mengkompilasi usulan tersebut menjadi urutan prioritas program, di mana keguatan mengkompilasi dilakukan oleh Pemdes dan FKM, 6) Musrebangdes, sebagai wahana atau forum untuk menyepakati usulan program CSR desa yang akan diajukan ke pihak perusahaan.

Berdasarkan penyusunan perencanaan program CSR seperti yang diuraikan di atas, memberikan indikasi bahwa perlu ada kerjasama dan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan program CSR yang bertumpu kepada pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada disain, maka penyusunan program CSR dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 : Mekanisme Proses Tahapan Perencanaan Program CSR di Desa

Dalam pemetaan tersebut, yang terjadi di lapangan adalah tidak ada jaminan bahwa usulan Musrebangdes ke perusahaan otomatis teralisasi. Hal inilah yang diperlukan pentingnya penyelesaian program CSR dengan melibatkan semua pihak untuk melakukan dialog dengan melakukan rekonsiliasi berorientasi pada win-win solution demi kepentingan harmonisasi dan kesejahteraan masyarakat serta keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Dengan kondisi seperti itu, penyelesaian masalah melalui disain resolusi konflik sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Konteks litigasi tidak selalu mampu menyelesaikan masalah, malahan justru acapkali memperkeruh masalah. Maka, dalam disain diusulkan dan disepakati oleh peserta FGD melalui upaya penyelesaian konflik dengan non-litigasi. Dasar pertimbangannya adalah lebih manusiawi dan menguntungkan semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, program CSR dapat berlangsung dengan harmonis, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat secara tepat sasaran.

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam hal melakukan validasi ahli dengan pakarnya untuk memperoleh masukan dan revisi draft dan melaksanakan uji coba empiris draft disain managemen resolusi konflik di daerah yang sudah ditentukan yaitu di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian dan analisis serta dilakukan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan:

1. Terdapat revisi draft yang diperoleh dari hasil validasi, yaitu meliputi: 1) Judul masih perlu diluruskan secara lebih fokus, 2) Rumusan masalah dipertegas dan tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalahnya, 3) Pedoman wawancara lebih terfokus kepada penyempurnaan draft disain, 4) FGD diusahakan menghadirkan decision maker dari instansi yang berkompeten.
2. Mekanisme proses tahapan perencanaan program CSR harus dimulai dari pemangku kepentingan di tingkat desa, dengan memanfaatkan Musrembangdes sebagai media penyusunan usulan program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi dana CSR yang telah dianggarkan oleh perusahaan.
3. Penyusunan program CSR menghadirkan pihak-pihak pemangku kepentingan, meliputi unsur pemerintahan, unsur pengambil keputusan dari perusahaan, serta melibatkan warga masyarakat/tokoh masyarakat setempat. Dalam istilah ketenagakerjaan disebut sebagai unsur tripartit.
4. Berdasarkan kajian teori dan hasil FGD, maka penyelesaian konflik yang ideal dalam disain managemen resolusi konflik dapat

ditempuh melalui: 1) pola win-win solution, 2) pola non-litigasi tanpa mengesampingkan litigasi dapat

5. dilakukan jika terjadi masalah krusial, 3) pola IDM (integrative Desicion Making) yaitu melalui dialog menyamakan persepsi dari semua pihak, 4) pola KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi), yaitu penyelesaian masalah konflik diselesaikan dengan interaksi komunikasi secara menyeluruh.
6. Untuk mencapai pola penyelesaian konflik diperlukan fasilitas sarana berupa reconsiliasi, mediasi dan arbitrasi dari pihak yang berkompeten, sehingga cara-cara litigasi dan kekerasan (demonstrasi) dapat dihindarkan demi kepentingan semua pihak yang saling menguntungkan.
7. Hasil dari penyelesaian konflik yang dilakukan dalam pola-pola di atas harus ada pengawasan dan penegakan hukum dari pihak pemerintah berdasarkan PP no 47/2012 dan penerapan sanksi yang tegas.
8. Penyelesaian konflik memerlukan tindak lanjut berupa daya dukung ekonomi masyarakat, yaitu melakukan pengembangan: a) food-estate, sebagai bentuk pendayagunaan lahan reklamasi tambang dan perkebunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,b) rehabilitasi lahan (hutan) untuk mencegah kerusakan lingkungan, c) konservasi sumber daya alam Kalimantan Timur, baik di bidang fauna maupun flora yang saat ini punah akibat kerusakan alam akibat tambang dan perkebunan serta industri.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak perusahaan dan pemerintah melakukan dialog atau FGD terhadap pemahaman undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan tambang dan perkebunan yang selama ini tidak jelas.
2. Dalam penyusunan program CSR perlu ada kajian lapangan dan social mapping untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Untuk mendukung terlaksananya penerapan disain managemen resolusi konflik di setiap penyelesaian konflik, penerapan sanksi harus tegas dan pengawasan dari pihak pemerintah secara konsisten dilakukan dengan cara berpedoman pada aturan yang ada, orientasi pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Sadikin, 2009. *Implementasi Program CSR pada Masyarakat Sekitar Tambang*
Batu bara di Kubar, Thesis (tidak dipublikasikan), Unmul, Samarinda

Anonim, 2012. *CSR Kembangkan Pertanian*, Kaltim Pos, Juli 2012

Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal,* kaltim Pos, September 2012

Bachriadi, Dianto. 1999. *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Petani di Indonesia*

Batten, T.R., 1967. *Communitiest and their Development*, London University Press

Irwin, Harry, 1994. *Managing Corporate Communication*, Malaysia

Irwanto, 2006. *Focussed Group Discussion , Sebuah Pengantar*, Jakarta, yayasan Obor

Isran Noor, 2012. *CSR Bisa Entaskan Kemiskinan*, Kaltim Pos: Agustus 2012

Jim Ife, 1995.Community *Development, Analysis and Practice*, Longman, Australia

Maria, 2012. Pemangku Kepentingan dalam Penyelesaian Konflik, Artikel Jurnal, diakses
Tgl 10 Oktober 2013

Mursyid R., 2012. *Mayoritas Tambang Tidak Taat Aturan*, Kaltim Pos, 4 September

Nasution S., 1988. *Penelitian Naturalistik*, Jemmars, Bandung

Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012

Pambudi T.S. 2005. *CSR Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Puspennas Depsos,
RI, Jakarta

Solihin, 2008. Penyelesaian Konflik dalam Dunia Bisnis, Artikel Jurnal, diakses tgl 14
September 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas